

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI MELALUI
KARTU TANI DI KELURAHAN TEPPU KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)**



OLEH:

**CITRA BUNGA MENTARI
NIM: 21202038602028**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2025**

**ANALISIS SISTEM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI MELALUI
KARTU TANI DI KELURAHAN TEPPU KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)**



OLEH:

CITRA BUNGA MENTARI

NIM: 2120203860202028

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
Pada Program Studi E konomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Citra Bunga Mentari

NIM : 2120203860202028

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbingan Skripsi
Nomor: B-1072/In.39/FEBI.01/PP.00.0/03/2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Sulkarnain, S.E. M.Si.
NIDN : 198805102019031005

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzalifah Muhammadun, M.Ag

NIP.19710208200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi
Melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten
Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Citra Bunga Mentari

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203860202028

Prodi Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B.1072/In.39/FEBI.04/PP.00.2024.

Tanggal Kelulusan : 07 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Sulkarnain, S.E.,M.Si. (Ketua)

(.....)

Dr. Zainal Said , M.H. (Anggota)

(.....)

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP.197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat dan kekuatan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai teladan umat menuju jalan kebenaran.

Penulis dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Setiap halaman yang tersusun adalah saksi bisu dari tangis, lelah, dan rasa ingin menyerah yang tak terhitung. Namun, di balik segala keterbatasan, ada doa-doa yang tak pernah putus, pelukan yang tak selalu hadir secara fisik namun hangatnya terasa hingga ke relung hati, dan cinta yang menguatkan ketika dunia terasa terlalu berat. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah hadir sebagai cahaya dalam gelap, terutama kepada dua sosok yang menjadi alasan penulis tetap bertahan ibunda Sumaini, yang setiap sujudnya adalah penyelamat di balik layar, dan ayahanda Hamsah, cinta pertama penulis, yang diam-diam selalu menguatkan lewat tutur sederhana namun sarat makna. Maaf jika penulis belum menjadi sebaik yang kalian harapkan, tetapi putri kecilmu yang kini mulai tumbuh dewasa ini masih belajar, masih jatuh bangun, dan masih menggenggam erat doa-doa kalian sebagai bekal menuju mimpi yang lebih tinggi. Skripsi ini bukan hanya akhir dari perjalanan akademik, tapi juga bukti kecil dari betapa besarnya cinta dan pengorbanan kalian yang tak pernah meminta balas.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh bapak Sulkarnain, S.E., M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya. Atas bimbingan dan bantuan, penulis ucapkan banyak terimakasih, penyusunan skripsi ini juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr.Hannani,M.Ag.sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr.Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare
4. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait akademik
5. Teruntuk saudara penulis, Junedi, Syifa, Tuti, Aswin, Akmal, Tanti yang telah memberi segenap dukungan, doa dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Teman seperjuangan yang sekarang sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing Imma, Besse, Nurmia, Elma, Riska, Marfi, Rahmawati.
7. Anomali penting di hidup penulis yang tidak pernah di rencanakan akan bertemu, seperti semesta yang diam-diam berkonspirasi mempertemukan penulis dengan jiwa-jiwa luar biasa Nabila, Sri Reski, Herdianti, Nur Isma Padila, Rijki Aulia Amnur.
8. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu.
9. Dan terakhir, terima kasih yang paling dalam penulis tujukan kepada diri sendiri yang tak pernah benar-benar baik-baik saja, tapi tetap memilih untuk bertahan. Maaf karena sering kali memaksa melangkah di tengah kelelahan yang tak terlihat, menahan tangis di malam yang sunyi, dan berpura-pura kuat saat hati ingin runtuh. Untuk semua luka yang disembunyikan di balik senyum, untuk semangat yang nyaris padam namun terus dipertahankan,

terima kasih. Mungkin tak banyak yang tahu seberapa berat semuanya terasa, tapi diri ini tahu dan itu sudah cukup. Semoga pencapaian ini menjadi pelukan hangat bagi jiwa yang lelah. Bukti kecil bahwa meski sempat ragu, ternyata masih bisa sejauh ini. Kamu bertahan. Dan itu, lebih dari cukup.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan ke depannya. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menambah wawasan bagi semua pihak.

Teppo, 15 Mei 2025 M
17 Dzulqaidah 1446 H

Penyusun,



CITRA BUNGA MENTARI
NIM 2120203860202028



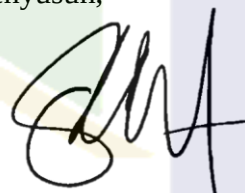
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : CITRA BUNGA MENTARI
NIM : 2120203860202028
Tempat/Tgl. Lahir : Teppo, 20 September 2003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu
tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang (Perspektif
Ekonomi Syaria)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Juni 2025
Penyusun,



CITRA BUNGA MENTARI
NIM 2120203860202028

ABSTRAK

Citra Bunga Mentari, *Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang* (di bimbing oleh Bapak Sulkarnain)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam sistem penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang. Meskipun program ini dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam distribusi pupuk subsidi, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterlambatan penyaluran, stok pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani, serta rendahnya pemahaman terhadap mekanisme penggunaan kartu tani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani, mengidentifikasi kendala dalam proses distribusi, serta menilai sistem tersebut berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penyuluh pertanian, distributor, pengecer, dan petani. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan teori sistem distribusi dan prinsip 6T (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu), serta dianalisis dengan pendekatan ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan larangan terhadap praktik riba dan gharar.

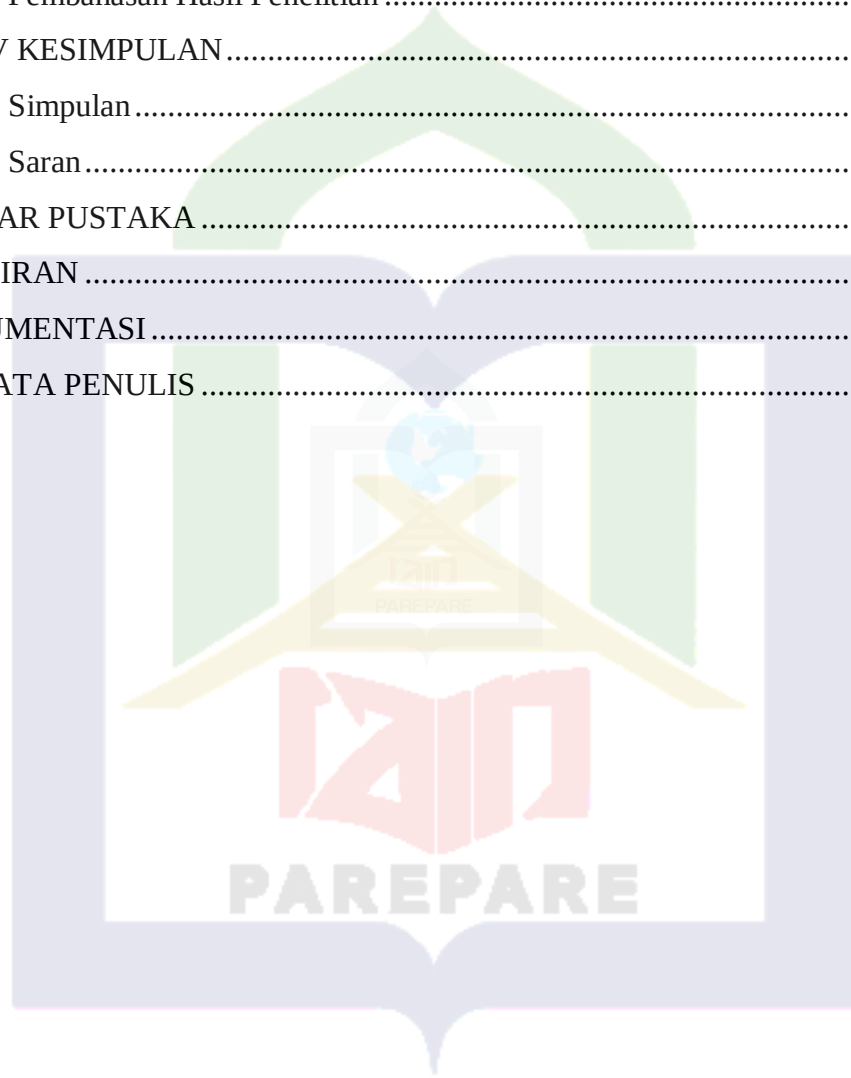
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun, dalam implementasinya di lapangan, masih terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan. Di antaranya adalah keterlambatan pengisian kuota pupuk dalam kartu tani, gangguan jaringan saat transaksi EDC, stok pupuk yang sering kosong di kios pengecer, serta ketidaksesuaian jumlah pupuk dengan alokasi dalam RDKK. Selain itu, harga pupuk subsidi di tingkat petani juga kerap tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Kartu Tani, Pupuk Subsidi, Sistem Penyaluran, Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual	35
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41

F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian	63
BAB V KESIMPULAN.....	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI
DOKUMENTASI.....	XXI
BIODATA PENULIS	XXIII



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Rencana definitive kebutuhan kelompok	7
4.1	Nama kelompok tani	49



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Saluran distribusi	15
2.2	Bagan kerangka pikir	38
4.1	Alur penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo	50
4.3	Kuota pupuk sesuai RDKK	53
4.4	Serah terima pupuk Ud Sahabat tani	55
4.5	Harga eceran tertinggi pupuk subsidi	59

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing	Terlampir
Lampiran 2	Berita Acara Revisi Judul	Terlampir
Lampiran 3	Surat izin meneliti dari kampus	Terlampir
Lampiran 4	Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang	Terlampir
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
Lampiran 6	Pedoman Wawancara	Terlampir
Lampiran 7	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
Lampiran 8	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 9	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*
 نُعِم : *Nu'ima*
 عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)
 عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Alyy* atau *'Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا
صلعم	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, makai a bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmkih berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang mata pencaharian utama masyarakatnya adalah sektor pertanian. Kondisi ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis, sehingga cuaca, tanah, dan sumber daya alam lainnya di setiap daerah memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan sektor pertanian. Pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian, oleh karena itu sumber daya yang terbatas harus dialokasikan seefisien mungkin agar pemanfaatannya dapat dimaksimalkan.¹

Pertanian merupakan salah satu pilar utama kehidupan manusia sejak peradaban pertama kali berkembang. Melalui kegiatan bercocok tanam dan beternak, manusia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan pangan, sandang, dan papan. Dalam konteks global saat ini, pertanian tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertanian tidak terlepas dari beberapa input sebagai penunjang untuk menghasilkan output dalam usaha tani seperti benih, pupuk serta pestisida.

Pupuk merupakan salah satu input pertanian yang sangat penting dalam suatu usaha tani, karena pupuk akan menyebabkan pertumbuhan tanaman sehingga tanaman tersebut mampu menghasilkan output yang maksimal.² Pupuk bersubsidi dan non-subsidi merupakan dua jenis pupuk utama yang digunakan oleh petani. Pupuk yang penyaluran dan pembeliannya dibiayai oleh pemerintah untuk memenuhi

¹ Abdurrozzaq Hasibuan et al., "Strategi Peningkatan Usaha Tani Padi Sawah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa," *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi* 1, no. 4 (2022): 477–90, <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i4.1095>.

² Irganov Maghfiroh, Gayatri Siwi, and Agus Subhan Gusti Prasetyo, "The Affecting of Farmer Ages, Level of Education and Farm Experience of the Farming Knowledge about Kartu Tani Beneficial and Method of Use in Parakan Distric, Temanggung Regency," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 19, no. 2 (2022): 209–21, <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.926>.

kebutuhan petani di masing-masing daerah disebut pupuk bersubsidi. Pupuk yang tergolong non-subsidi adalah pupuk yang penyaluran dan pembeliannya tidak berada di bawah pengawasan pemerintah dan tidak mendapatkan bantuan dana. Saat ini, petani menggunakan berbagai jenis pupuk bersubsidi, antara lain pupuk organik, NPK, urea, dan Poska.³

Salah satu alat pendukung sektor pertanian yang berfungsi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adalah Kartu Tani. Kartu Tani digunakan untuk mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi. Manfaatnya meliputi penyediaan pupuk bersubsidi yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur alokasi pupuk serta memberikan arahan kepada pejabat terkait dalam mendukung penyaluran pupuk kepada petani, khususnya petani padi, sesuai peraturan menteri perdagangan nomor 04 tahun 2023 yang berlaku. Selain itu, Kartu Tani juga berfungsi sebagai alat untuk menebus pupuk subsidi, menabung, dan mendapatkan bantuan sosial.⁴ Dalam rangka menangani tantangan dalam pengawasan, pengadaan, dan distribusi pupuk bersubsidi, pemerintah memperkenalkan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Kartu ini merupakan kartu debit bank co-branding yang digunakan untuk mencatat alokasi pupuk bersubsidi dan memproses pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang disediakan oleh bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI), di kios resmi penyalur pupuk bersubsidi.⁵

Pada tahun 2019, pemerintah belum mewajibkan penggunaan kartu tani di seluruh Indonesia. Program kartu tani yang diinisiasi mulai tahun 2016,

³ Ramlayana, Isa Ansyari, and Sudarmi, "Efektifitas Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Para Petani Padi Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone," *Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar* 1, no. 4 (2020): 949–62.

⁴ Suryani Suryani, Santun R. P. Sitorus, and Untung Sudadi, "Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan," *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 8, no. 2 (2020): 147–60, <https://doi.org/10.14710/jwl.8.2.147-160>.

⁵ Nur Mufidah and Indah Prabawati, "Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Mahasiswa* 6, no. 9 (2018): hal 1-8.

pelaksanaanya dilakukan secara bertahap Dimana pada tahun 2017 kartu tani baru diterapkan dipulau jawa (provinsi jawa barat, provinsi banten, provinsi jawa Tengah, provinsi jawa timur, dan provinsi DI Yogyakarta). Selanjutnya pada tahun 2018, program diperluas di 10 provinsi di luar pulau jawa yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera barat, Sumatera Selatan , lampung, Kalimantan barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi atas berbagai peristiwa penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi yang memberikan dampak merugikan, terutama bagi petani. Dengan diterapkannya program Kartu Tani, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan petani.⁶

Untuk memperoleh kartu tani, petani harus bergabung dalam kelompok tani. Jenis dan jumlah pupuk bersubsidi yang diterima petani melalui kartu tani akan disesuaikan dengan luas lahan, komoditas, dan jenis pupuk yang direncanakan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh penyuluh bersama petani, kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI).

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan setelah permohonan diajukan kepada Ketua Kelompok Tani dengan membawa KTP dan luas lahan yang dimiliki. Untuk pengurusan kartu tani, Kelurahan atau Kecamatan dirujuk ke Bank. Petani yang telah memiliki kartu tani membeli pupuk bersubsidi di kios resmi yang telah ditetapkan pemerintah, bukan langsung di kios. Aturan penyaluran pupuk bersubsidi ini dibuat untuk membantu para petugas yang bertugas memfasilitasi kelancaran pengadaan pupuk agar dapat berfungsi secara efektif.⁷ Tujuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah agar petani yang membutuhkan dapat memperolehnya dengan mudah dan lancar.

⁶ Endro Gunawan and Sahat Pasaribu, “Persepsi Petani Dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2020): 131–44, <https://doi.org/10.14203/jep.28.2.2020.131-144>.

⁷ Ade Rahmawati, Ulpah Jakiyah, and Dona Setia Umbara, “Efektivitas Kartu Tani Terhadap Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kelurahan Cibenti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Tanaman* 2, no. 1 (2023): 08–24, <https://doi.org/10.55606/jurrit.v2i1.1230>.

Kegiatan pertanian sangat bergantung pada penggunaan pupuk untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang optimal. Namun, petani seringkali menghadapi kelangkaan pupuk, harga yang fluktuatif, serta masalah dalam pendistribusian pupuk ke masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai bentuk pengawasan dalam mengatur alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Pertanian RI, pupuk bersubsidi adalah barang yang diawasi, di mana pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.⁸

Dalam konteks kajian ekonomi, sistem distribusi merupakan komponen krusial, terutama dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam mencakup pelarangan riba dan gharar, penerapan keadilan, regulasi kepemilikan, serta larangan penimbunan barang. Aktivitas distribusi berperan penting dalam menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan meningkatkan perputaran kekayaan, mencegah konsentrasi harta pada segelintir kelompok, dan mendorong pemerataan ekonomi. Terkait penelitian ini, penyaluran pupuk bersubsidi melalui program kartu tani diharapkan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Ekonomi dalam pandangan Islam diatur berdasarkan keselarasan dengan pedoman dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an serta Hadits. Ayat tersebut menegaskan bahwa kekayaan harus didistribusikan dengan adil sesuai dengan sasarannya, tanpa membedakan status sosial, baik kaya maupun miskin, berjabatan atau tidak, serta tanpa adanya diskriminasi lainnya. Islam melarang segala bentuk hambatan dalam proses distribusi, termasuk penyalahgunaan aturan seperti

⁸ Mutiara Latifa Ashari and Dyah Hariani, "Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara," *Journal of Public Policy and Management Review* 8, no. 2 (2019): 1–21, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/23711/21583>.

manipulasi harga. Distribusi yang sesuai dengan prinsip syariah akan memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa merugikan salah satu. Contohnya, penyaluran pupuk subsidi yang menerapkan prinsip 6T, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu.

Implementasi nilai-nilai dan prinsip Islam dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui program kartu tani dapat diwujudkan oleh para distributor yang dalam aktivitasnya selalu mempraktikkan perilaku terpuji, mengikuti teladan Nabi Muhammad saw sebagai panutan umat. Karakter-karakter mulia tersebut meliputi kejujuran, penghindaran praktik penipuan, penolakan terhadap riba dan gharar dalam transaksi, keterbukaan dan transparansi terhadap petani, sikap bertanggung jawab, ketaatan pada nasihat, kecerdasan (*fathonah*), pengamalan nilai syariah dalam setiap kegiatan, komitmen menepati janji, serta penyampaian kebenaran (*tabligh*).

Mayoritas penduduk Kabupaten Pinrang bermata pencaharian sebagai petani, dan lahan pertanian di sana sangat cocok untuk menanam padi. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan. Salah satu kecamatan di Kabupaten Pinrang adalah Kecamatan Patampanua. Kelurahan Teppo merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Penduduk Kelurahan Teppo pada umumnya berbeda dengan penduduk yang tinggal di kota-kota besar dalam hal kondisi ekonomi dan sifat pribadi. Karena lahan pertanian di daerah ini masih sangat luas secara geografis, penduduk di Kelurahan ini bekerja di bidang pertanian. Kartu tani telah diberlakukan sejak tahun 2020 hingga saat ini, pembagian pupuk bersubsidi melalui kartu tani sering mengalami berbagai tantangan di lapangan, di antaranya: kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya menabung untuk pembelian pupuk subsidi setelah masa panen, penyaluran yang tidak tepat sasaran, penimbunan pupuk,

pengawasan yang lemah, regulasi yang sering berubah-ubah, petani tidak mendapatkan pupuk yang dibutuhkan.⁹

Penelitian mengenai program kartu tani telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Penelitian pertama dengan judul “Implementasi Kebijakan Kartu Tani di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang” mengkaji implementasi kebijakan kartu tani di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Widungsari Kabupaten Magelang.¹⁰ Penelitian kedua dengan judul “Efektivitas Kartu Tani Terhadap Penyaluran Pupuk Subsidi di Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya” mengkaji mengenai mengetahui pengaruh efektivitas terhadap pupuk subsidi di Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya”.¹¹ Dan penelitian ketiga dengan judul “Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Kartu Tani Pada Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Padakkalawa Kecamatan Mattirotulu Kabupaten Pinrang” mengkaji mengenai sejauh mana persepsi petani dalam menggunakan kartu tani dan faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani.¹²

Meskipun ketiga penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan tentang program kartu tani, ada kesenjangan yang belum terjangkau, terutama mengenai analisis penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani, yang mana pelaksanaannya pada wilayah yang lebih spesifik, yaitu di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Belum ada penelitian yang secara khusus mengevaluasi bagaimana dampak adanya program kartu tani di daerah ini.

⁹ Saptaning Ruju Paminto et al., “Fungsionalisasi Kartu Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 114–24, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.288>.

¹⁰ Triwati, “Implementasi Kebijakan Kartu Tani Di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang,” 2019.

¹¹ Ade Rahmawati, Ulpah Jakiyah, and Dona Setia Umbara, “Efektivitas Kartu Tani Terhadap Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.”

¹² Ronal Kurniawan, Faidah Azuz, and Nurlaela Nurlaela, “Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Kartu Tani Pada Pupuk Bersubsidi Di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirotulu Kabupaten Pinrang,” *PALLANGGA: Journal of Agriculture Science and Research* 2, no. 2 (2024): 105–10, <https://doi.org/10.56326/pallangga.v2i2.3366>.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani secara spesifik di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Meskipun banyak penelitian terkait distribusi kartu tani, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan melihat pelaksanaan program kartu tani merupakan relative baru dan dirancang untuk mengatasi ketidak tepatan sasaran pemberian subsidi.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, dari beberapa Masyarakat petani mengungkapkan bahwa pihak pengecer sering kali mengatakan kehabisan stok pupuk di gudangnya padahal pupuk sudah di butuhkan Masyarakat petani, sehingga mau tak mau suka atau tidak petani membeli pupuk non subsidi padahal sudah ada jatah yang di tentukan sesuai RDKK namun pihak pengecer selalu saja kehabisan stok di gudangnya. Adapun daftar kebutuhan pupuk subsidi sesuai RDKK.

Nama	Rencana Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)											
		UREA				NPK				NPK FORMULA			
		MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML
Sudirman	1,400	150	150	0	300	100	100	0	200	0	0	0	0
Hamzah	0,400	45	45	0	90	50	50	0	100	0	0	0	0
Tamrin	2,000	200	200	0	400	100	100	0	200	0	0	0	0
Ismail	1,140	100	100	0	200	100	100	0	200	0	0	0	0

Tabel 1.1 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

Sumber data : Dikelolah oleh peneliti 2025

Kepemilikan lahan pertanian oleh petani padi di Kelurahan Teppo rata-rata kurang dari “sebagian” atau lahan pertanian dengan luas kurang lebih 2.000 m². maka dari itu sangat menarik untuk mengetahui bagaimana keberhasilan proses dalam pembagian pupuk yang ada. Oleh karena itu, dari penjelasan yang menjadi kunci pokok maka penelitian ini mengambil judul “ Analisis Sistem Penyaluran Pupuk

Subsidi Melalui Kartu Tani Di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pernyataan masalah dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani yang ada di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja kendala dalam proses penyaluran pupuk subsidi khususnya di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana sistem penyaluran pupuk subsidi melalaui kartu tani berdasarkan Perspektif ekonomi syariaih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani yang ada di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.
3. Untuk memahami sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani berdasarkan Perspektif ekonomi syariah di Desa Teppo Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan dalam menambah wawasan mengenai proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang . Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami hal yang berkaitan dengan pembagian pupuk bersubsidi melalui kartu tani dan dapat menjadi tambahan Pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah, badan penyuluhan tani, masyarakat dan distributor dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum memulai penelitian, peneliti mendapatkan beberapa kajian pustaka yang relevan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Kajian pustaka merupakan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa topik yang diangkat merupakan hal baru yang belum pernah dibahas oleh peneliti lain. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya diantaranya, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Triwati dari Universitas Tidar pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Kartu Tani di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendefinisikan sistem kartu tani, mempelajari pandangan masyarakat umum terhadap penggunaannya, dan mengidentifikasi harapan dan tantangan yang terkait dengan implementasinya di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem distribusi, sistem informasi manajemen pertanian (SIMPI), dan sistem subsidi semuanya berdampak pada sistem penggunaan kartu tani. Tidak ada perbedaan yang terlihat dalam bagaimana daerah dataran rendah dan perbukitan terlihat dalam hal penggunaan kartu tani. Biasanya, kartu tani hanya digunakan untuk membeli pupuk yang telah disubsidi. Diharapkan aspek prosedural dan teknis pembelian dan peningkatan jumlah kuota pupuk akan dipermudah, tetapi kurangnya sosialisasi di tingkat kelompok tani menjadi hambatan utama penggunaan kartu tani.¹³

Adapun persamaan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, keduanya sama-sama membahas tentang

¹³ Triwati, “Implementasi Kebijakan Kartu Tani Di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.”

program Kartu Tani sebagai kebijakan pemerintah dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti petani, pengecer, dan instansi pemerintah. Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triwati dari Universitas Tidar pada tahun 2019. Penelitian Triwati lebih berfokus pada implementasi kebijakan kartu tani secara umum, termasuk prosedur administrasi dan persepsi masyarakat di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani secara khusus di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, dengan menambahkan perspektif ekonomi syariah sebagai landasan analisis. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek teknis dan administratif, tetapi juga menilai kesesuaian penyaluran pupuk bersubsidi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba dan penimbunan (ikhhtikar).

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahmawati dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya pada tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Kartu Tani Terhadap Penyaluran Pupuk Subsidi di Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi di Kelurahan Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Sebanyak 559 petani penerima kartu tani menjadi populasi penelitian. Sebanyak 85 orang responden dipilih secara acak. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan observasi. Untuk memperoleh informasi, petani Kelurahan Cibeuti yang tergabung dalam kelompok tani diamati secara langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian, kartu tani sangat efektif dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kelurahan Cibeuti Kota Tasikmalaya. Indikator ketepatan waktu

penyaluran pupuk yang paling dapat diandalkan adalah ketepatan waktu dengan nilai efisiensi sebesar 0,005 atau kurang dari 0,05.¹⁴

Adapun persamaan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, keduanya membahas penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam sektor pertanian keduanya membahas mengenai program kartu tani pemerintah dan keduanya juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, membahas mengenai tingkat efektivitas kartu tani, pada penyaluran pupuk subsidi di daerah Cibeuti Kota Tasikmalaya, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu membahas mengenai hal apa saja menjadi kendala dalam penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ronal Kurniawan dari Universitas Bosowa pada tahun 2023 dengan judul “Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Kartu Tani Pada Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Padakkalawa Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi petani terhadap penggunaan kartu tani dan faktor-faktor yang memengaruhi sikap mereka. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kelurahan Padakkalawa, Kecamatan Mattiobulu, Kabupaten Pinrang, dengan jumlah peserta sebanyak 101 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tabulasi silang dan analisis chi-square. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 38,61% responden menganggap kartu tani sulit digunakan, sedangkan 61,39% menganggap kartu tani mudah digunakan.¹⁵

Adapun persamaan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, Keduanya sama-sama membahas mengenai program kartu tani sebagai sarana penyaluran pupuk bersubsidi, serta

¹⁴ Ade Rahmawati, Ulpah Jakiyah, and Dona Setia Umbara, “Efektivitas Kartu Tani Terhadap Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.”

¹⁵ Kurniawan, Azuz, and Nurlaela, “Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Kartu Tani Pada Pupuk Bersubsidi Di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang.”

dilakukan di wilayah Kabupaten Pinrang, meskipun pada kelurahan yang berbeda. Selain itu, keduanya bertujuan untuk memberikan masukan terhadap perbaikan distribusi pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran. Adapun perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada persepsi petani terhadap penggunaan kartu tani, serta faktor-faktor yang memengaruhi sikap mereka, dengan pendekatan kuantitatif menggunakan tabulasi silang dan analisis chi-square. Penelitian tersebut menekankan pada statistik dan persentase pendapat petani mengenai kemudahan atau kesulitan dalam menggunakan kartu tani. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan lebih menitikberatkan pada analisis sistem penyaluran pupuk subsidi secara menyeluruh, termasuk kendala di lapangan dan tinjauan berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai respons petani, tetapi juga mengevaluasi distribusi berdasarkan nilai-nilai seperti keadilan, amanah, dan transparansi menurut prinsip Islam. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, meneliti persepsi petani terhadap penggunaan Kartu Tani, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu membahas mengenai hal apa saja yang menjadi kendala dalam sistem penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Sistem Penyaluran

a. Pengertian sistem penyaluran

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor, sistem penyaluran adalah rangkaian proses distribusi barang di mana terdapat intervensi pemerintah dalam mewujudkan mekanisme pasar yang sehat.¹⁶ Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai regulator dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pasar yang sehat.

¹⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Sistem penyaluran erat kaitannya dengan konsep distribusi, yang secara umum diartikan sebagai kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.¹⁷ Distribusi berperan penting dalam menciptakan pemerataan kekayaan, agar kepemilikan harta tidak terfokus pada satu kelompok tertentu, melainkan tersebar secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Distribusi juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta dari individu atau kelompok, baik yang bersifat pribadi maupun milik umum, kepada pihak-pihak yang memang berhak menerimanya.¹⁸ Tujuan utama dari adanya distribusi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Distributor merupakan orang yang mendistribusikan barang. Umat Islam dalam mendistribusikan barang dari produser ke konsumen hendaknya menggunakan etika bisnis Islam dan prinsip ekonomi Islam¹⁹

b. Macam-macam saluran distribusi

Menurut Kholida Qhotrunnada, sistem penyaluran berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen dalam pemasaran produk.²⁰ Sistem saluran distribusi merupakan serangkaian tahapan yang diimplementasikan oleh suatu usaha untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen hingga ke konsumen. Hal ini juga dapat diartikan sebagai proses pendistribusian produk kepada pihak-pihak terkait seperti konsumen atau

¹⁷ Zulkarnaen et al., “Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di Kpu Jawa Barat,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. June (2020): 222–43, <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/372>.

¹⁸ Dewantara and Aditama, “ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam),” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 20–36.

¹⁹ Ali Akbar, Muhammad Kamal Zubair, and Ali Rusdi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Distributor Udang Di Desa Jampue, Kab. Pinrang,” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022), https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i2.3482.

²⁰ Kholida Qhotrunnada, “Saluran Sistribusi: Fungsi, Jenis, Hingga Tahapannya,” accessed February 15, 2025, <https://finance.detik.com/>.

pelanggan.²¹ Dalam proses pendistribusian produk tersebut, diperlukan saluran yang tepat agar tujuan distribusi dapat tercapai. Keberadaan saluran distribusi bertujuan untuk memastikan barang sampai ke tangan konsumen dengan aman dan lancar. Sistem saluran distribusi yang efektif akan memberikan manfaat berupa dukungan terhadap proses produktivitas bagi konsumen.

Beberapa elemen yang berperan sebagai perantara memiliki fungsi penting dalam proses distribusi produksi. Komponen-komponen tersebut meliputi produsen, distributor, pengecer, dan konsumen yang semuanya terlibat dalam sistem. Dalam konteks penyaluran pupuk bersubsidi, terdapat lima komponen dengan peran masing-masing yang berbeda, sebagaimana diatur dalam PERMENDAG Tahun 2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang mengidentifikasi lima pihak yang berpartisipasi dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.²²

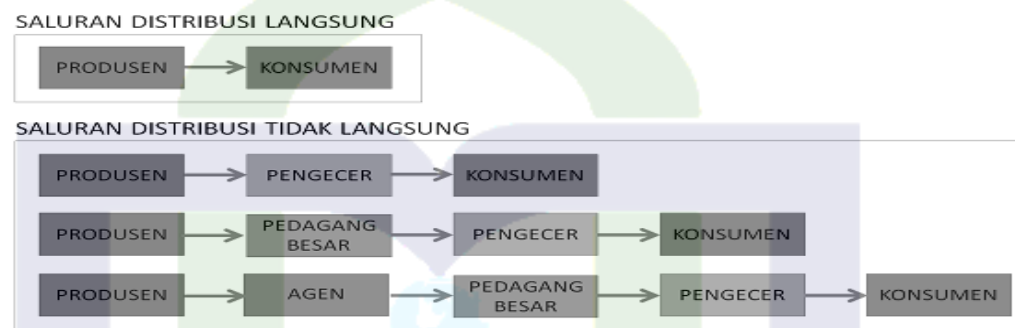
Pertama, perusahaan yang memproduksi pupuk organik dan anorganik dikenal sebagai produsen pupuk. Kedua, produsen menunjuk distributor—perusahaan perorangan atau badan hukum—sesuai dengan undang-undang untuk mengelola pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam lingkup kewenangannya. Ketiga, pengecer adalah perusahaan independen di tingkat kecamatan dan/atau Kelurahan yang ditunjuk oleh distributor sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjual pupuk bersubsidi secara eksklusif kepada organisasi petani dan/atau petani di lingkup kewenangannya. Keempat, petani merupakan perorangan

²¹ Anggi, “Saluran Distribusi: Pengertian, Fungsi Tahapan Dan Cara Memilihnya,” accessed February 15, 2025, <https://accurate.id/>.

²² Meliana Ayu Safitri, “Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa Di Sumberpucung Kabupaten Malang)” (Brawijaya University, 2011).

Warga Negara Indonesia yang mengelola lahan untuk budidaya tanaman, hijauan pakan ternak atau budidaya ikan.²³

Menurut Tjiptono, saluran distribusi merupakan jalur yang dilalui barang dan jasa dari produsen ke konsumen akhir. Saluran ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. seperti pupuk bersubsidi. Agar memudahkan dapat dilihat pada di bawah ini



Gambar 2.1 Saluran distribusi.

Sumber : <https://ilmumanajemenindustri.com/>

Saluran distribusi langsung adalah ketika produsen menyalurkan produknya secara langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara. Sebaliknya, saluran distribusi tidak langsung melibatkan satu atau lebih perantara, seperti distributor dan pengecer, dalam menyalurkan produk dari produsen ke konsumen akhir.²⁴ Dalam konteks distribusi barang bersubsidi, penggunaan saluran distribusi tidak langsung lazim diterapkan. Namun, panjangnya rantai distribusi sering kali menjadi faktor penghambat efektivitas program. Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor, distribusi yang terlalu panjang dan tidak efisien dapat membuka peluang terjadinya kekosongan barang,

²³ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Di Akses Pada 15 February 2025.

²⁴ Fandy Tjiptono, “Strategi Pemasaran, Edisi 4, Yogyakarta,” Penerbit Andi Offset, 2017.

penimbunan, hingga ketidak tepatan suplai.²⁵ Hal ini menunjukkan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam sistem distribusi barang publik

Berikut ini merupakan beberapa saluran distribusi yang biasa digunakan dalam suatu barang industri :²⁶

1) Produsen-Konsumen

Saluran distribusi dari produsen langsung ke konsumen termasuk dalam kategori saluran distribusi langsung. Hal ini terjadi karena produk dikirimkan dari produsen kepada konsumen tanpa melalui pihak perantara. Alternatif lainnya adalah produsen dapat mengunjungi langsung rumah konsumen untuk menyampaikan produknya.

2) Produsen-Pengecer-Konsumen

Pola distribusi di mana produsen menjual produknya dalam jumlah cukup besar kepada pengecer. Selanjutnya, pengecer menjual kembali produk tersebut kepada konsumen, biasanya dalam jumlah yang lebih kecil atau secara eceran. Dengan pola ini, rantai pasokan produk hanya terdiri dari tiga tahapan saja.

3) Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Pola distribusi yang berbeda dengan distribusi langsung karena melibatkan beberapa elemen perantara. Dalam saluran ini, produsen menjual produknya secara massal atau dalam jumlah besar kepada pedagang besar. Pedagang besar kemudian melakukan transaksi jual beli dengan pengecer atau kios, di mana produk masih dijual dalam bentuk grosir. Selanjutnya, pengecer menerima produk dari pedagang besar dan menjualnya kembali kepada konsumen dalam bentuk eceran.

²⁵ Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*.

²⁶ J S Wiliam, J Michael, and J W Bruce, "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran, Cetakan 1" (Bandung: Penerbit Mandar Maju. PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUK, 1994).

4) Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Saluran ini memiliki rantai terpanjang karena melibatkan lima elemen. Produsen awalnya menyalurkan produknya melalui bantuan agen, kemudian dari agen produk diteruskan ke pedagang besar. Setelah berada di pedagang besar, produk dijual kepada pengecer yang akhirnya menyalurkannya ke konsumen.

Berdasarkan berbagai rantai distribusi yang telah dijelaskan, jika dihubungkan dengan penelitian ini mengenai analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani, penelitian ini menggunakan saluran distribusi model ketiga yaitu produsen- pedagang besar-pengecer- konsumen. Distribusi pupuk subsidi belum dapat menggunakan sistem langsung sehingga membutuhkan perantara agar pupuk dapat sampai ke tangan petani.

Dalam proses distribusi pupuk subsidi, terdapat beberapa pihak yang berperan di setiap tahap rantainya. Pertama adalah produsen, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab dalam memproduksi pupuk bersubsidi. Kemudian ada agen, yakni distributor resmi yang telah ditunjuk langsung oleh pihak produsen. Selanjutnya adalah pengecer, berupa kios atau tempat penyaluran pupuk subsidi yang menerima pasokan dari agen. Terakhir adalah konsumen, yaitu para petani atau kelompok tani yang berhak menerima pupuk subsidi.

Rantai distribusi pupuk subsidi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab para pelaku distribusi, tetapi juga melibatkan peran aktif dari pemerintah. Pemerintah memiliki posisi yang setara dalam proses distribusi, tidak hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, tetapi juga lewat dukungan dalam bentuk edukasi dan pendampingan kepada petani.²⁷ Salah satu pihak yang berperan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah Badan Penyuluh Pertanian (BPP), yang bertugas memberikan informasi serta

²⁷ I Putu Cakra Putra Adnyana and Muhammad Saleh Mohktar, "Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah Di Provinsi Ntb," *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 13, no. 2 (2019): 201, <https://doi.org/10.24843/soca.2019.v13.i02.p05>.

bimbingan teknis kepada petani. Badan inilah yang biasanya berinteraksi langsung dengan para petani di lapangan. Mereka berperan dalam memantau kegiatan pertanian sekaligus melakukan pendataan terhadap petani yang layak menerima pupuk subsidi. Kehadiran pemerintah dalam proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran pupuk subsidi berjalan dengan baik dan sesuai prinsip 6T, yaitu: tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat.²⁸

2. Subsidi

a. Pengertian Subsidi

Subsidi merupakan isu lama, yang menimbulkan kontroversi mengenai pro dan kontra. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah agar anggaran subsidi yang direncanakan dapat memenuhi tujuan pemberian subsidi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Menurut KBBI subsidi merupakan bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah). Sedangkan menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Economics*, subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima.²⁹

Bentuk subsidi yaitu *profit loss* dan *cost loss*. Dalam *profit loss*, subsidi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menutupi selisih antara harga jual atau manfaat yang diberikan produk dengan harga dasar atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Oleh karena itu, subsidi berupa *profit*

²⁸ Windy Novita Azhari, “Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi (Kabupaten Gunungkidul),” 2018.

²⁹ Milton H Spencer and Orley M Amos Jr, “*Contemporary Economics*, Edisi Ke-8” (Worth Publishers, New York, 1993).

loss adalah bentuk pemerataan harga jual dan harga pokok untuk menutupi selisih antara keuntungan dan kerugian produsen. Sedangkan *cost loss*, harga jualnya tidak berdasarkan harga pokok namun justru menggunakan harga pasar dimana selisih antara harga pasar dan harga jual menjadi biaya yang harus ditanggung.³⁰

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat diuraikan bahwa subsidi merupakan bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada berbagai pihak, seperti yayasan, perkumpulan, perusahaan, atau rumah tangga. Tujuan utama subsidi ini adalah untuk meringankan beban penerima serta mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Pemerintah menetapkan subsidi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara dan efek ekonomi yang diharapkan.

b. Pupuk Subsidi

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan serta penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi pupuk yang mendapat subsidi seperti pupuk urea, SP 36, ZA, NPK, dan jenis lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.³¹

Menurut Abdul Aziz mendefinisikan pupuk bersubsidi sebagai program pemerintah yang memberikan bantuan keuangan untuk pembelian dan penyaluran pupuk kepada petani dalam rangka meningkatkan kondisi ekonomi dan produktivitas mereka.³² Istilah "pupuk bersubsidi" mengacu

³⁰ R Wardana, "Pengertian Subsidi Dan Contoh Kebijakan Subsidi Di Indonesia," *Diambil Kembali Dari Lifepal: <https://lifepal.co.id/media/subsidi>*, 2020.

³¹ Danu Bagus Pratama, "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 197–214, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.794>.

³² DKurniawan, *Seri Analisis Kebijakan Fiskal Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Ketahanan Pangan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., 2017).

pada produk yang diberikan kepada petani di bawah kendali pemerintah untuk memudahkan mendapat pupuk.³³

Regulasi mengenai pupuk bersubsidi dibuat agar penetapan harga dapat dilakukan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) mengingat pemerintah mengawasi produk tersebut. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penetapan penyaluran dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian.³⁴

Di dalam peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah terdapat beberapa hal yang menjadi point penting. Pertama, terkait harga yang ditetapkan sebagai standar bagi pedagang atau kios dalam menjual pupuk. Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi dasar penetapan harga. Oleh karena itu, kios atau toko mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini, bukan menetapkan harga jual sendiri. Kedua, hanya dua jenis pupuk yang memenuhi syarat subsidi, yakni urea dan NPK. Sementara itu, jenis tanaman yang memenuhi syarat subsidi pupuk adalah hortikultura, perkebunan, dan tanaman pangan. Ketiga, petani maksimal memiliki lahan seluas dua hektare per musim tanam. Menurut Teti Nur Hayati selama proses penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran maka pihaknya harus menerapkan prinsip 6T yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, tepat tempat dan tepat harga. Komponen dalam pendistribusian pupuk subsidi sudah seharusnya menerapkan prinsip ini. Dengan begitu, tidak mustahil suatu produktivitas dapat berjalan dengan lancar. Petani yang memiliki lahan tidak kurang dari dua hektar berhak mendapatkan pupuk subsidi. Persyaratan terbaru seorang

³³ Saptaning Ruju Paminto, "Fungsionalisasi Kartu Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 114–24, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.288>.

³⁴ Ikmal Kholis and Khasan Setiaji, "Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi," *Economic Education Analysis Journal* 9, no. 2 (2020): 503–15, <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39543>.

petani mendapatkan pupuk subsidi yaitu tergabung dalam kelompok tani dan memiliki kartu tani. Namun, sejumlah kendala menyebabkan keenam prinsip tersebut tidak dapat terealisasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

1) Tepat jenis pupuk

Jenis pupuk yang tepat adalah jenis pupuk yang digunakan petani sesuai dengan petunjuk resmi. Pupuk yang dianjurkan pemerintah antara lain pupuk urea, pupuk ZA, pupuk NPK, dan pupuk organik.

2) Tepat jumlah pupuk

Tepat jumlah adalah jumlah pemupukan yang dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah.

3) Tepat harga pupuk

Menetapkan harga adalah hal yang sangat penting dalam perekonomian atau perdagangan.³⁵ Harga yang tepat adalah ketika pembelian pupuk bersubsidi tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Dalam hal ini, petani atau kelompok tani harus mengetahui dan memahami HET dari setiap jenis pupuk bersubsidi yang tersedia.

4) Tepat waktu

Tepat waktu merujuk pada kondisi di mana petani menerima alokasi pupuk pada saat yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu umumnya sebelum masa tanam dimulai, tepatnya saat proses pengolahan lahan berlangsung.

5) Tepat mutu

Tepat mutu artinya pupuk yang didistribusikan kepada petani harus memenuhi standar kualitas yang layak, baik dari segi bentuk fisik (tidak menggumpal, tidak kadaluarsa), kadar unsur hara, dan keamanan bagi

³⁵ Syahriyah Semaun and Darwis, "Pengaruh Strategi Penetapan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen (Analisis Etika Bisnis Islam)," *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020).

lingkungan. Mutu yang baik akan menjamin efektivitas pemupukan dan mencegah risiko kerusakan tanaman atau tanah.

6) Tepat tempat

Tepat tempat menekankan pentingnya pendistribusian pupuk pada lokasi yang sesuai dengan titik distribusi kelompok tani atau kios resmi, agar mudah diakses oleh petani. Penyaluran yang tepat tempat menghindari biaya tambahan transportasi dan memastikan pupuk tidak bocor keluar dari wilayah sasaran.³⁶

3. Kartu Tani

a. Pengertian kartu tani

Menurut Biro Infrasda Kartu Tani adalah kartu debit co-branding BRI yang perlu diketahui kuota atau jatah pupuk sesuai dengan luas lahan yang dimiliki. Pembayaran Pupuk bersubsidi ini biasanya ditempatkan di pengecer yang menggunakan Mesin Electronic Data Capture (EDC). Setiap melakukan transaksi maka secara otomatis akan mengurangi saldo rekening Tabungan yang dimiliki oleh petani.³⁷

Kartu tani merupakan kartu identitas yang diberikan kepada petani untuk mempermudah akses terhadap pupuk bersubsidi. Selain berfungsi sebagai identitas, kartu ini juga dapat digunakan sebagai kartu ATM yang diterbitkan oleh sejumlah bank BUMN, seperti Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Kartu tani, yang juga berfungsi sebagai kartu debit BRI, dirancang khusus untuk mengakses informasi alokasi pupuk bersubsidi serta melakukan transaksi pembayaran pupuk melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) BRI di tempat pengecer resmi.

³⁶ Teti Nuryanti et al., “Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Tingkat Petani Di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi,” *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)* 6, no. 1 (2023): 162, <https://doi.org/10.52434/mja.v6i1.2421>.

³⁷ Biro Infrastruktur dan sumber Day, “Program Kartu Tani : BRI Co- Branding,” 2019, <https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/>.

Alokasi pupuk bersubsidi didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh masing-masing petani dan dicatat secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) BRI. Setiap kali petani melakukan transaksi penebusan pupuk, alokasi pupuk bersubsidi dan saldo dalam rekening tabungan mereka akan secara otomatis berkurang.

Sistem distribusi pupuk menggunakan kartu tani berbeda dengan sistem sebelumnya karena distribusi dilakukan langsung kepada petani berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tercatat di SIMPI, dengan kuota maksimal untuk lahan seluas 2 hektare. Kartu tani juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pupuk, seperti perpindahan ke wilayah lain. Dalam sistem ini, subsidi diberikan langsung oleh pemerintah, sehingga harga pupuk yang diterima petani sudah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, dan informasi tersebut dapat diakses secara online melalui aplikasi SIMPI. Alur distribusi pupuk melalui kartu tani dimulai dari produsen ke distributor, dilanjutkan ke Kios Pupuk Lengkap (KPL), dan kemudian ke petani. Petani dapat membeli pupuk langsung di pengecer dengan cara menggesek kartu tani di mesin EDC yang tersedia.³⁸

Penggunaan Kartu Tani melalui beberapa tahapan, dimulai dari proses pendataan hingga transaksi pembelian pupuk bersubsidi. Untuk dapat menggunakan Kartu Tani, petani harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai anggota dalam kelompok tani
- 2) Menyediakan fotokopi KTP
- 3) Menyediakan fotokopi Kartu Keluarga (KK)

³⁸ Rohana Solihhatun NURJANAH, "Efektivitas Penggunaan Kartu Tani Untuk Pembelian Pupuk Bersubsidi Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas (Doctoral Dissertation; Universitas Jenderal Soedirman)," 2019.

- 4) Melampirkan bukti kepemilikan lahan, seperti SPPT
- 5) Menyertakan data terkait luas lahan dan identitas pemilik lahan

b. Manfaat Kartu Tani

Kartu tani yang menjadi identitas pemegang kartu, secara teori berfungsi sebagai kartu debit untuk tabungan, pinjaman, subsidi, atau bantuan lainnya. Data dan informasi mengenai identitas petani (nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), luas lahan, komoditas, alokasi pupuk bersubsidi, kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), dan hasil panen semuanya termuat dalam basis data kartu tani. Tujuan dari sistem kartu tani ini adalah untuk memungkinkan akses terhadap layanan yang ditawarkan oleh Kementerian Pertanian, Bulog, dan bank penerbit (dalam hal ini, Bank BRI), PT. Pupuk Indonesia, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah turut serta dalam proses entri data, verifikasi, pemantauan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh. Selain itu, pemasok pupuk (PT. Pupuk Indonesia) mengawasi stok sarana produksi pertanian dan memantau ketersediaan infrastruktur, sementara Kementerian Pertanian memutuskan kapan pupuk harus dialokasikan. Sementara itu, tanggung jawab bank meliputi penerimaan setoran kartu tani dari petani, penerbitan kartu tani, dan pengembangan Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SIMPI).³⁹ Manfaat Kartu Tani dapat dirasakan baik oleh pemerintah maupun petani. Secara garis besar, berikut keuntungan yang diperoleh:

- 1) Untuk Pemerintah:
 - a) Memperoleh data petani yang lebih akurat, lengkap, dan saling terhubung antar sistem.
 - b) Dapat memantau luas lahan pertanian berdasarkan jenis komoditas dan wilayah secara rinci.

³⁹ S. Pasaribu, "Persepsi Petani Dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2020): h.131-144.

- c) Menyusun kebijakan berdasarkan data prediksi hasil panen yang lebih terpercaya.
- d) Menyalurkan bantuan subsidi maupun sosial dengan lebih tepat sasaran.

2) Untuk Petani:

- a) Menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan), baik yang bersubsidi maupun non-subsidi.
- b) Mempermudah penjualan hasil panen langsung ke off-taker tanpa harus lewat tengkulak.
- c) Akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) jadi lebih mudah.
- d) Mendorong petani untuk terbiasa menabung dan tidak konsumtif.
- e) Menekan biaya penyimpanan hasil panen atau kebutuhan lainnya.
- f) Berpeluang mengikuti program Prona dari BPN untuk sertifikasi tanah.
- g) Lebih mudah mengakses berbagai jenis subsidi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kemenkop.
- h) Memperoleh bantuan sosial dengan lebih cepat dan tepat.
- i) Mendapatkan informasi kebutuhan pupuk serta distribusinya di berbagai wilayah.
- j) Proses distribusi pupuk menjadi lebih tepat sesuai prinsip 6 Tepat: jumlah, waktu, tempat, mutu, jenis, dan sasaran.
- k) Memudahkan pengelolaan stok dan proyeksi produksi pupuk.
- l) Transaksi hasil panen lebih efisien karena terhubung dengan sistem pembayaran digital.
- m) Akses informasi kebutuhan pupuk dan sebarannya menjadi lebih transparan dan real-time.

4. Sistem penyaluran Perspektif ekonomi syariah

Ekonomi secara umum adalah ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam.⁴⁰ Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang secara spesifik mengatur dan memandu aktivitas ekonomi dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam.⁴¹ Pendapat lain menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsepnya tentang keadilan.⁴² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi diartikan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada individu maupun kelompok. Selain itu, distribusi juga dapat dipahami sebagai kegiatan pendistribusian kebutuhan pokok yang dilakukan oleh pemerintah kepada pegawai negeri, masyarakat umum, atau pihak-pihak lainnya.

Ekonomi Islam dalam berbagai literturnya memuat nilai-nilai ajaran Islam. Secara umum, ekonomi Islam dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip yang mengatur perilaku ekonomi umat, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.⁴³ Perspektif ekonomi Islam merujuk pada cara pandang Islam terhadap suatu permasalahan, di mana setiap analisis dilakukan dengan berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Konsep distribusi dalam ekonomi Islam hampir sama dengan konsep distribusi pada umumnya. Sederhananya, dalam distribusi islam nilai-nilai syariah berfungsi sebagai pedoman dalam pendistribusian suatu produk.⁴⁴ Distribusi terkait dengan prinsip dan tujuan Islam, yaitu mencari keridhaan

⁴⁰ Hamka et al., "Konsep Ekonomi Islam: Pemikiran Abu Yusuf Economic Concept: Thoughts of Abu Yusuf," *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 25–35, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5968>.

⁴¹ Afdhal Afdhal et al., *Sistem Ekonomi Islam* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

⁴² An Ras Try Astuti, "Ekonomi Berkeadilan: Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perpektif Muhammad Baqir Al-Sadr," *IAIN Pare-Pare* 4, no. 01 (2020): 20.

⁴³ Lukman Hakim, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam" (Jakarta: Erlangga, 2012).

⁴⁴ Muh Arafah, *Etika Pelaku Bisnis Islam* (wawasan Ilmu, 2022).

Allah SWT. Penyaluran barang dengan tujuan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Bukan tidak mungkin tujuan distribusi akan tercapai dan semua prosedur distribusi akan dipermudah. Hal ini sesuai dengan Surah Al Ankabut ayat 69 yaitu:

الْمُحْسِنِينَ □ لَمَعَ اللَّهُ وَإِنْ سُبُلُنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ فِينَا جَاهِدُوا وَالَّذِينَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.”⁴⁵

Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan kemudahan dan petunjuk bagi siapa saja yang dengan sungguh-sungguh mencari keridhaan-Nya. Allah akan membimbing mereka, memberi bantuan, menguatkan tekad mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan mendapatkan kemenangan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Namun demikian, Allah tetap mengawasi proses pendistribusian petunjuk ini untuk memastikan bahwa para penyalur tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

a. Prinsip-prinsip distribusi dalam islam

Terdapat sejumlah prinsip distribusi yang harus diterapkan dalam penyaluran produk yang mematuhi syariah, yaitu:

1) Dilarangnya unsur riba dan gharar

Riba merupakan perbuatan mengambil keuntungan berlebih dari pihak lain dalam transaksi jual beli. Selain itu, riba juga bermakna sebagai penambahan nilai yang tidak sah ketika mengambil suatu barang.

Pelarangan riba tercantum dalam surah al-imran ayat 130.

⁴⁵ Kementerian Agama, “Al Qur’an Dan Terjemahannya,” [https://quran.kemenag.go.id/\(29:69\)](https://quran.kemenag.go.id/(29:69)), 2022.

أَفَا مُضَاعَفَةٌ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁴⁶

Ayat tersebut menegaskan larangan praktik riba bagi umat Islam. Pada masa lampau, riba dipraktikkan dengan cara menambahkan jumlah pembayaran atas pinjaman jika pelunasan dilakukan melebihi waktu yang ditentukan. Akibatnya, jumlah utang menjadi semakin besar dan memberatkan salah satu pihak. Riba tidak hanya terjadi dalam praktik pinjam-meminjam, tetapi juga dapat muncul dalam transaksi jual beli yang merugikan salah satu pihak.

Sedangkan gharar dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian.⁴⁷ Maksudnya, dalam segala bentuk transaksi, unsur gharar (ketidakpastian) tidak diperkenankan. Contohnya ketika seseorang melakukan transaksi namun belum mengetahui kualitas barang, sehingga tidak dapat memastikan apakah kualitasnya baik atau buruk. Islam melarang segala tindakan yang merugikan salah satu pihak. Telah diketahui bahwa riba membawa dampak negatif bagi penerima transaksi, begitu pula dengan gharar. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli, unsur riba dan gharar dilarang dan harus dihindari semaksimal mungkin.⁴⁸

2) Prinsip keadilan

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang mencerminkan kondisi ketidakberpihakan kepada satu pihak atau kelompok tertentu. Distribusi merupakan upaya maksimal untuk menciptakan pemerataan keadilan terhadap harta. Menurut pandangan

⁴⁶ Kementerian Agama, “AL Qur’an Dan Terjemahannya,” [https://quran.kemenag.go.id/\(3:130\)](https://quran.kemenag.go.id/(3:130)), 2022.

⁴⁷ Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*.

⁴⁸ Eko S Fuadi et al., “Ekonomi Syariah, Yayasan Kita Menulis, Medan,” 2021.

Haneef dan Mohammed dalam buku "Dasar-Dasar Ekonomi Islam", proses pendistribusian dapat dilakukan melalui beberapa pilihan alternatif yaitu: Positive measure, merupakan parameter tindakan yang sifatnya wajib dilaksanakan seperti zakat dan pembagian waris, Voluntary measure, merupakan parameter tindakan yang bersifat sukarela di antaranya infaq, shadaqah, hadiah dan hibah, Prohibitive measure, merupakan parameter yang berisi larangan seperti pelarangan riba dan berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi.⁴⁹

Mewujudkan keadilan adalah suatu kewajiban bagi semua pihak, baik pemerintah, pegawai, maupun masyarakat umum.⁵⁰ Dalam konteks distribusi, keadilan mengharuskan produk terdistribusi secara tepat untuk meminimalkan kesenjangan antara berbagai pihak.⁵¹ Dengan demikian, jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin dapat dijembatani dengan efektif, hal ini juga sudah di atur dalam Q.S Al Hayr ayat 7 :

الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلَرَّسُولٍ هَٰذَا قُلُّ الْقُرَىٰ أَهْلٍ مِّن رَّسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا
اتَّكُم وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّيِّئِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى
الْعِقَابُ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقِ فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَيْكُمْ وَمَا فَحَذُّهُ الرَّسُولُ

Terjemahnya :

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.⁵²

⁴⁹ Safarinda Imani et al., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Global Eksekutif Teknologi, 2022).

⁵⁰ Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*.

⁵¹ Ivonne Ayesha et al., *Ekonomi Mikro Islam* (Global Eksekutif Teknologi, 2022).

⁵² Kementerian Agama, “Al Qur’an Dan Terjemahannya,” <https://quran.kemenag.go.id/> (7:59), 2022.

Islam mengarahkan sistem ekonomi agar berjalan sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Hadits. Ayat tersebut memiliki makna bahwa setiap harta hendaknya didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks ini, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status kekayaan, jabatan, atau faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan ketimpangan. Islam melarang praktik-praktik yang menghambat proses distribusi, seperti penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan, contohnya menaikkan harga secara tidak wajar. Distribusi yang sesuai dengan syariah akan memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa merugikan pihak manapun. Hal ini tercermin dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang menerapkan prinsip 6T yakni tepat waktu, tepat harga, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat tempat.

3) Prinsip kepemilikan

Islam menetapkan bahwa Allah swt adalah pemilik sejati dari semua harta. Prinsip ini sejalan dengan pernyataan dalam Al Qur'an surah Al Maidah ayat 120.

قَدِيرٌ □ شَيْءٍ كُلِّىْ عِلٌّ وَهُوَ فِيْهِنَّ وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكُ اللَّهِ

Terjemahnya :

“Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁵³

Ayat ini menjadi landasan bahwa kepemilikan adalah hak mutlak milik Allah swt. Dialah satu-satunya pemilik segala yang ada di langit dan bumi. Seluruh kekayaan yang tersebar di alam semesta merupakan anugerah Allah swt kepada makhluk-Nya. Manusia hanyalah pemegang amanah dari-Nya yang diharapkan dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Penggunaan harta tersebut seharusnya mengikuti ketentuan Allah swt.

⁵³ Kemetrian Agama, “Al Qurán Dan Terjemahannya,” <https://quran.kemenag.go.id/> (5:120), 2022.

Kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi hanyalah sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga dan mengupayakan kemakmuran bumi. Tentunya ini dilaksanakan berdasarkan ajaran-Nya sebagai wujud penegakan kebenaran dalam memanfaatkan harta yang dimiliki.⁵⁴ Dengan demikian, hal ini bertentangan dengan pendapat bahwa manusia adalah pemilik harta dan memiliki otoritas penuh atas hartanya sehingga dapat dengan bebas menggunakan harta tersebut.

4) Dilarangnya menimbun harta

Menumpuk kekayaan secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan sosial dengan menciptakan kelompok yang hanya fokus pada keuntungan pribadi. Praktik penimbunan dilakukan dengan sengaja untuk memanipulasi harga ketika produk menjadi langka.⁵⁵ Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk membeli barang terhambat, yang mengganggu dinamika pasar dan menyulitkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok.⁵⁶ Oleh karena itu, penting untuk melarang praktik penimbunan harta.

b. Kebijakan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Pendistribusian yang dilandasi nilai-nilai keislaman memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Kebijakan tersebut mengarahkan penyaluran produk untuk mencapai tujuan distribusi berupa kemaslahatan umat dan ridha Allah SWT. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar distribusi dalam Islam meliputi penghapusan unsur riba dan gharar, penerapan keadilan, pengaturan kepemilikan, serta larangan praktik ikhtikar atau penimbunan barang. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi dalam kebijakan distribusi.

⁵⁴ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Dan Tafsir* (Amzah, 2022).

⁵⁵ Azhasyah Ibrahim, "Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-BI," 2021.

⁵⁶ Sarwo Edi, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, "Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam," *Jurnal Emt Kita* 6, no. 1 (2022): 1–6.

Kekayaan yang telah dianugerahkan Allah SWT hendaknya dimanfaatkan secara optimal. Perputaran harta perlu dijaga agar merata dan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir kelompok. Dalam konteks distribusi, pihak distributor dilarang menyalurkan produk yang mengandung unsur riba atau gharar, demikian juga dengan praktik penimbunan barang. Sistem distribusi yang berlandaskan syariat Islam tidak memperkenankan adanya unsur-unsur tersebut.

Distributor yang telah dipercaya seharusnya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Proses penyaluran produk memiliki potensi menghadapi berbagai permasalahan. Keterlibatan banyak pihak dan lemahnya pengawasan pemerintah menciptakan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan curang. Pelaku penyalahgunaan produk umumnya berasal dari lingkungan internal itu sendiri.⁵⁷ Sistem distribusi dalam Islam melarang tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Contohnya, kios atau pengecer yang berperan sebagai agen penerima kuota pupuk bersubsidi diharapkan berlaku jujur dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Melihat kompleksitas rantai distribusi produk, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mendukung terciptanya keadilan dalam sistem distribusi. Telah disadari bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara mandiri menciptakan keadilan. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam aspek pengawasan. Di samping tugasnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah juga diharapkan menjadi fasilitator dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Keberadaan regulasi yang berlaku menunjukkan adanya intervensi pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tetap bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi regulasi tersebut.

⁵⁷ Danu Bagus Pratama, "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 197–214.

Mencari keridhaan Allah SWT adalah tujuan utama dari distribusi Islam. Ini bukan sekadar pernyataan; ini perlu dilaksanakan dengan wawasan yang lengkap. Yang membedakan distribusi dari yang lain adalah penggunaan ajaran Islam. Sudah diketahui umum bahwa distribusi biasanya menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada kemampuan produsen untuk mengirimkan barang yang dimaksud kepada pelanggan, terlepas dari apakah ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Mengetahui landasan yang berdasar pada tujuan akhir tersebut, menjadi hal yang harus seorang pelaku pendistribusian pupuk subsidi menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Menyadari bahwa ada Dzat yang selalu mengawasinya. Dalam penggalan QS. An-Nisaa ayat 1 yaitu:

رَقِيبًا عَلَيْكُم مَّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”⁵⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt memiliki sifat yaitu Maha Melihat. Sebagai pelaku distribusi yang menjalankan kewajibannya dengan berdasar pada syariat hendaknya menyadari bahwa setiap perbuatannya tidak terlepas dari pantauan Allah swt. Dengan adanya kesadaran bahwa Allah swt Maha Melihat, penyalur hendaknya menerapkan sikap-sikap yang khasanah. Ada beberapa sikap yang perlu dihadirkan bagi seorang penyalur pupuk subsidi.

Dalam buku Etika Pelaku Bisnis Islam karya Muhammad Arafah penyalur hendaknya menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan syariah yaitu:⁵⁹

⁵⁸ Kementerian Agama, “Al Qur’an Dan Terjemahannya,” [https://quran.kemenag.go.id/\(4:1\)](https://quran.kemenag.go.id/(4:1)), 2022.

1) Bersikap jujur

Jujur merupakan salah satu sifat terpuji seseorang. Jujur dapat diartikan sebagai sifat yang berlandaskan pada kesamaan antara apa yang diucapkan dengan perbuatannya. Dalam menjalankan suatu usaha pelaku bisnis hendaknya selalu bersikap jujur dalam segala hal. Selain. Bersikap jujur akan menutupi perilaku tercela seperti penipuan, menyembunyikan cacat barang dan lainnya.

2) Bersikap amanah

Amanah berarti "dapat dipercaya." Konsep ini seharusnya berlaku bagi para pelaku usaha yang berupaya mengelola perusahaannya secara penuh dan bertanggung jawab, baik sebagai pedagang grosir, kios, maupun toko, agar pihak lain dapat mempercayai mereka karena mereka merasa aman dan nyaman saat berbisnis dengan mereka.

3) Menghindari praktik jual beli yang mengandung unsur riba, mubadzir, judi dan gharar

Proses jual beli haruslah dilakukan dengan menghindari adanya unsur riba, judi, mubadzir, maupun gharar sebagai komponennya, karena konsumen sangat dirugikan dengan adanya unsur tersebut.

4) Berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan

Rasulullah saw telah menjadikan Islam sebagai tuntunan dan contoh, termasuk menjauhi larangan Allah SWT. Dengan mengikuti anjuran, berbisnis menjadi lebih mudah dan mencegah penipuan dalam transaksi jual beli. Misalnya, jangan pernah berbohong dan selalu berkata jujur. Dengan hanya mematuhi ketentuan yang berlaku, distributor pupuk yang menggunakan kartu tani telah diberikan kemudahan dalam hal pupuk bersubsidi. Begitu pula dengan harga. Karena pupuk bersubsidi dijual

⁵⁹ Muhammad Arafah, *Etika Perilaku Bisnis Islam* (Bayumas: Wawasan Ilmu, 2022).

dengan menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET), maka larangan untuk menaikkan harga terlalu tinggi telah diatur.

C. Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini memperoleh titik temu dalam penelitian ini yang berjudul anlisi sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo kabupaten Pinrang maka, perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani

Sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi distribusi pupuk kepada petani. Kerangka konseptualnya melibatkan beberapa komponen utama. Pertama, kebijakan pemerintah sebagai landasan regulasi yang mengatur mekanisme subsidi dan penerapan kartu tani. Kedua, mekanisme distribusi, mencakup proses registrasi petani, verifikasi data melalui kartu tani, dan pencocokan kebutuhan pupuk dengan alokasi yang tersedia. Faktor teknologi memegang peranan penting dalam mendukung implementasi sistem, memastikan aksesibilitas dan integritas data. Ketiga, manfaat yang dihasilkan, seperti kemudahan bagi petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, penurunan biaya produksi, dan peningkatan produktivitas hasil pertanian. Keberhasilan sistem ini dipengaruhi oleh berbagai tantangan dan hambatan, termasuk faktor sosial seperti pemahaman petani terhadap teknologi kartu tani, faktor ekonomi terkait distribusi pupuk di daerah terpencil, serta faktor teknis seperti gangguan sistem atau ketersediaan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kartu tani sebagai alat distribusi pupuk bersubsidi dapat memberikan wawasan mengenai dampak kebijakan ini terhadap keberlanjutan sektor pertanian, terutama dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

2. Kendala dalam sistem penyaluran pupuk subsidi

Beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani masih dirasakan oleh petani. Salah satunya adalah ketidaksesuaian harga jual di tingkat pengecer dengan Harga Eceran Tertinggi

(HET), yang menyebabkan beban tambahan bagi petani. Selain itu, keterlambatan dalam proses pengambilan pupuk juga menjadi permasalahan tersendiri. Hambatan lainnya adalah gangguan teknis, seperti jaringan internet yang tidak stabil, sehingga mesin EDC yang digunakan pengecer sering tidak berfungsi maksimal. Hal ini menghambat proses transaksi petani dalam menebus pupuk. Di samping itu, terdapat pula kelalaian dari pihak Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang tidak menginput kuota pupuk ke dalam sistem. Akibatnya, meskipun petani telah memiliki kartu tani dan jatah pupuk sesuai RDKK, mereka tidak dapat menebus pupuk karena data tidak terbaca dalam sistem. Kedua kendala ini menyebabkan sistem distribusi tidak berjalan optimal sesuai dengan prinsip 6T, yakni tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana sistem penyaluran tersebut jika ditinjau melalui perspektif ekonomi syariah. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai keadilan, keterbukaan, amanah, dan larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan ikhtikar (penimbunan). Dalam kerangka ini, penyaluran pupuk subsidi seharusnya tidak hanya berfokus pada efisiensi teknis semata, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam ekonomi Islam, distribusi merupakan aspek penting yang tidak hanya berkaitan dengan pemindahan barang atau jasa, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan (al-‘adalah), amanah, dan transparansi (al-shafaiyyah).

Prinsip keadilan menuntut agar pupuk didistribusikan secara merata dan proporsional kepada petani yang berhak, sesuai dengan kebutuhan dan luas lahan mereka, tanpa adanya diskriminasi atau penyimpangan. Prinsip amanah mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran, seperti penyuluh,

distributor, dan pengecer, untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Sementara itu, prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait harga, kuota, dan prosedur penyaluran, agar petani tidak dirugikan akibat ketidaktahuan atau praktik tidak jujur. Lebih dari itu, sistem penyaluran pupuk subsidi juga harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (tambahan yang merugikan dalam transaksi), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian), dan ikhtikar (penimbunan untuk memperoleh keuntungan sepihak). Apabila sistem penyaluran pupuk subsidi masih mengandung unsur-unsur tersebut, maka secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat serta pembinaan kepada seluruh pelaku distribusi agar sistem penyaluran ini tidak hanya efisien dan tepat sasaran, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan bagi seluruh petani, sebagaimana tujuan utama dalam ekonomi syariah, yaitu mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

D. Kerangka Pikir

Pada penelitian fokus utama pada sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani yang diterapkan di Kelurahan Teppo. Dalam konteks tersebut, penyaluran pupuk subsidi menjadi pusat perhatian karena merupakan bagian penting dalam mendukung produktivitas petani dan menjamin ketepatan sasaran kebijakan subsidi dari pemerintah. Penelitian ini difokuskan pada sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang. Penyaluran pupuk subsidi menjadi perhatian utama karena berperan penting dalam mendukung produktivitas pertanian dan menjamin ketepatan sasaran kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian ini, pembahasan diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, dari perspektif ekonomi syariah, peneliti menganalisis sejauh mana sistem penyaluran pupuk subsidi mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, keterbukaan, amanah, larangan riba dan gharar, serta distribusi yang berorientasi pada masalah (kemanfaatan umum). Peneliti juga mengkaji prinsip 6T (tepat waktu, tepat jumlah,

tepat mutu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat jenis) sebagai tolak ukur teknis dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Kedua, peneliti mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi dalam praktik penyaluran, seperti ketidaktepatan jumlah pupuk, keterlambatan distribusi, manipulasi data oleh oknum pengecer/distributor.

Kedua aspek tersebut prinsip syariah dan kendala distribusi kemudian dihubungkan untuk melihat implikasinya terhadap kesejahteraan petani, baik dari sisi ekonomi maupun keadilan distribusi. Dengan kerangka pikir ini, peneliti berupaya menyusun analisis secara menyeluruh dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem penyaluran pupuk subsidi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan riil petani. Untuk lebih singkatnya dapat dilihat alur penelitian ini pada *Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir* sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, mendalam, dan terperinci terhadap suatu permasalahan tertentu yang sedang berlangsung. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, yang merupakan isu aktual dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh berbagai aspek yang terkait, seperti mekanisme distribusi, peran para aktor (petani, pengecer, distributor, pemerintah), serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan kontekstual, sekaligus menilai sejauh mana sistem distribusi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian metodis untuk menyelidiki hipotesis dan fakta yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari topik penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat, melaksanakan tugas pengamatan, mencatat, dan mewawancarai.⁶⁰ Jenis penelitian ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan informasi melalui observasi, wawancara, dan pencatatan di lapangan dalam bentuk deskripsi dan gambar untuk lebih

⁶⁰ Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

memahami bagaimana sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan dimulai dari bulan April 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka perlu adanya fokus penelitian. Fokus penelitian ini mengenai sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani.

D. Jenis dan Sumber Data

Segala kegiatan penelitian memerlukan sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan serta jawaban yang dicari. Berikut adalah beberapa sumber data yang akan digunakan peneliti.

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah data kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Data kualitatif mengacu pada informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menarik kesimpulan yang mendalam.⁶¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui metode pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi.⁶² Penggunaan data primer mempermudah peneliti mendapatkan informasi yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks penelitian, sehingga hasilnya menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan badan penyuluhan pertanian, distributor pupuk, pengecer, dan petani untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumber aslinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan telah dikumpulkan serta dianalisis oleh pihak lain sebelumnya. Data ini diambil dari sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, statistik dari lembaga resmi, atau dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.⁶³ Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperkaya kajian teori dan analisis, serta memberikan pandangan yang lebih luas atau perbandingan dengan studi-studi yang sudah ada tanpa harus melakukan pengumpulan data dari awal.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian untuk menyempurnakan hasil penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang menggunakan pancaindera yang meliputi penglihatan, penciuman, dan pendengaran, untuk

⁶² Achjar, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁶³ Wawan Kurniawan dan Aat Agustini, *Metodologi Penelitian Kesehatan Dan Keperawatan; Buku Lovrinz Publishing* (LovRinz Publishing, 2021).

memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil observasi berupa kegiatan, kejadian, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosional seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran sebenarnya tentang suatu peristiwa atau fenomena guna menjawab pertanyaan penelitian.⁶⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui percakapan atau dialog yang terstruktur dan terarah antara pewawancara dengan narasumber (informan). Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi, sudut pandang, pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai suatu topik atau persoalan tertentu dari sudut pandang orang yang diwawancarai. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya atau yang berkembang secara spontan berdasarkan jawaban orang yang diwawancarai. Narasumber memberikan jawaban dan penjelasan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Data yang diperoleh dari wawancara biasanya berupa narasi verbal yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam konteks teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai jenis dokumen, baik cetak maupun elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa catatan, laporan, arsip, surat, buku, catatan harian, foto, video, rekaman audio, data online dan bentuk materi tertulis atau visual lainnya yang relevan dengan penelitian.

⁶⁴ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.

2. Teknik Pengolahan Data

Tahap pengolahan data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisir dan menganalisis data mentah agar dapat menghasilkan informasi yang berarti. Menurut Creswell, pengolahan data mencakup langkah-langkah sistematis yang dimulai dari persiapan data, seperti transkripsi wawancara dan pengorganisasian catatan lapangan, hingga analisis mendalam untuk menemukan pola dan tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian ini berdasarkan konsep penelitian kualitatif Crasswell dalam buku Adhi Kusumastuti,⁶⁵ yaitu :

- a. Transkripsi, yaitu mengubah hasil wawancara yang direkam menjadi bentuk teks tertulis agar dapat dianalisis lebih lanjut.
- b. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan sumber dan jenisnya (misalnya data dari petani, pengecer, distributor, dan pihak penyuluh).
- c. Pengenalan data, yaitu membaca seluruh data secara menyeluruh untuk memahami konteks dan makna umum dari informasi yang diperoleh.
- d. Koding, yakni proses pemberian kode atau label pada data sesuai kategori tertentu, seperti “sistem distribusi”, “kendala penyaluran”, atau “perspektif ekonomi syariah”.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁶ Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kebenaran data dalam investigasi ini. Penerapan pemeriksaan ditentukan oleh faktor-faktor spesifik tertentu. Dalam penelitian

⁶⁵ Adhi Kusumastuti, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif* (Deepublish, 2020).

⁶⁶ Fikri, dkk., “*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare*,” Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.

kualitatif, validitas data dinilai menggunakan empat kriteria yaitu keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Dengan ini, memverifikasi dan memvalidasi data yang dikumpulkan dengan membuktikan dan menguji data yang diperoleh.

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Menurut Moleong, yang dikutip oleh Adhi Kusumastuti, metodologi triangulasi digunakan untuk memverifikasi keaslian data dengan menggunakan metode alternative di luar data untuk tujuan verifikasi atau perbandingan data.⁶⁷ Metode triangulasi yang paling populer adalah mencari melalui sumber lain.

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik triangulasi untuk mendapatkan informasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang di dapat dari satu sumber dengan sumber lain dari distributor, pengecer, dan petani dengan mengecek data yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut
2. Triangulasi metode yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya maka, peneliti akan membandingkan beberapa metode hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi agar dapat menarik suatu kesimpulan.
3. Triangulasi waktu adalah metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara pada satu waktu tertentu, kemudian melakukan pengecekan ulang terhadap data tersebut melalui wawancara lanjutan pada waktu yang berbeda. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi yang diberikan oleh narasumber dan menghindari bias yang mungkin muncul akibat kondisi atau situasi tertentu saat wawancara pertama dilakukan.

⁶⁷ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustmail Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengatur, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Analisis data mencakup langkah-langkah seperti pengkodean, pengelompokan, dan penyajian informasi dalam bentuk yang lebih terstruktur, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh di lapangan. Menurut Miles dan Huberman tahap dan langkah-langkah analisis dan pengolahan data dengan pendekatan penelitian *case study* atau studi kasus yang dapat dilakukan peneliti dalam penelitian, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih unsur-unsur pokok, memusatkan perhatian pada unsur-unsur yang penting, mencari tema dan pola, kemudian mengeliminasi yang tidak diperlukan. Reduksi digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil penelitian.⁶⁸

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyediakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁶⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan yang disajikan dalam bentuk

⁶⁸ Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan" (Bandung: Alfabeta, 2010), 336.

⁶⁹ Sandu Sianto dan M. Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123.

deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajiian penelitian yang dimana data yang telah terkumpul di evaluasi untuk pencarian makna serta memberikan penjelasan terhadap data yang diperoleh. Dengan demikian, penarikan simpulan memungkinkan dapat menjawab rumusan yang dirumuskan sejak awal atau bahkan tidak karena rumusan masalah terkadang bersifat sementara. Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, dalam temuan ini akan berupa deskriptif dan gambaran pada suatu objek yang masih belum jelas, karena setelah dilakukan penelitian maka akan menghasilkan sesuatu yang jelas dan tuntas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian dan sumber data yang berkaitan, peneliti dapat melakukan analisis terhadap sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Kartu Tani Di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

1. Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Kartu Tani Di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

Sistem penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam distribusi pupuk subsidi kepada petani. Sebelumnya, penyaluran pupuk masih dilakukan secara manual dan belum berbasis sistem.

Sebelum dapat menerima pupuk subsidi, petani harus terlebih dahulu mendapatkan kartu tani. Berdasarkan hasil wawancara, proses mendapatkan kartu ini diawali oleh pendataan dari pihak penyuluh pertanian. Petani menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), dan bukti kepemilikan lahan. Setelah itu, data mereka diverifikasi dan dimasukkan ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Barulah kemudian kartu tani dicetak dan dibagikan.

Saat ini, akses terhadap kartu tani sudah merata di kalangan petani di Kelurahan Teppo. Meskipun pada awal implementasinya terdapat beberapa kendala teknis dan administratif, namun seiring berjalannya sebagian besar petani telah memiliki kartu tani. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan:

Dulu awalnya agak lama urusnya, tapi sekarang hampir semua petani di Kelurahan Teppo ini sudah punya kartu tani⁷⁰

Sekarang kartu tani sudah hampir menyeluruh. Kalau ada yang belum punya, biasanya karena lahannya masih dalam proses balik nama atau belum masuk kelompok.⁷¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani kini telah berjalan dan merata sejak tahap awal pendataan hingga proses penebusan pupuk. Perlu terus dilakukan pembinaan dan pengawasan agar sistem ini tetap efektif dan tidak menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan di tingkat bawah.

Dengan demikian, pupuk subsidi tidak dapat langsung diterima oleh petani tanpa adanya pihak perantara. Proses penyaluran dari produsen hingga ke tangan petani dikenal sebagai saluran distribusi. Secara umum, saluran distribusi ada dua yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi tidak langsung melibatkan peran perantara, sedangkan distribusi langsung tidak memerlukannya. Penyaluran pupuk bersubsidi dari UD Sahabat Tani kepada kelompok tani dilakukan dengan mekanisme yang serupa dengan transaksi jual beli pupuk pada umumnya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hasnah, anggota Badan Penyuluh Pertanian (BPP) di Kelurahan Teppo, tercatat ada 17 kelompok tani di kelurahan Teppo yang telah menggunakan Kartu Tani sebagai alat untuk menebus pupuk subsidi berikut ini.

⁷⁰ Ambosumi, "Petani," Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025, n.d.

⁷¹ Andini, "Petani," Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025, n.d.

No.	Nama Petani	Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1	ABD. Hakim	Lura II	49
2	Basir	Mamminasae II	53
3	Hamzah	Lura	85
4	Sudirman	Mamminasae I	45
5	Hamsah	Yamasei	83
6	Andini	Massiddiadae I	52
7	Usri	Masiddiadae II	56
8	Surifno	Sejahterah	40
9	Arifuddin	Siraga-ragae	55
10	Sumaini	Demparani	30
11	Baharuddin	Bunga Padi	68
12	Saifuddin	Masumpuloloe	55
13	Wahyudin	Lura I	61
14	Sinar	Padaidi	88
15	Hj. Siara	Bunga Padi I	70
16	Ambosumi	Tangkoli	34
17	Nuar	Mattutue	98

Tabel 4.1 Nama Kelompok Tani di Kelurahan Teppo

Sumber data : Dikelolah oleh peneliti,2025.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sitti Hasnah selaku penyuluh pertanian Kelurahan Teppo yang ditemui di Kantor BPP, diperoleh informasi bahwa sistem penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo menerapkan saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi ini melibatkan beberapa pihak, yaitu produsen, distributor, pengecer, petani (kelompok tani). Proses distribusi dimulai dari penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh penyuluh bersama petani. Setelah RDKK disusun, dokumen tersebut diserahkan kepada distributor CV Mekar Tani, kemudian pengecer UD Sahabat Tani melakukan pemesanan ke distributor sesuai kuota kebutuhan. Distributor kemudian memesan pupuk dari dua produsen utama, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik. Ibu Sitti Hasnah menjelaskan:

Jadi awalnya kami bantu petani susun RDKK, lalu RDKK itu kita serahkan ke distributor CV Mekar Tani. Setelah itu, pengecer UD Sahabat Tani yang akan pesan ke distributor, baru nanti distributor yang pesan ke PT Pupuk Kaltim atau PT Petrokimia Gresik. Sehingga sistem ini bersifat berjenjang dan tidak langsung dari produsen ke petani.⁷²

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses distribusi pupuk subsidi di Kelurahan Teppo masih memerlukan tahapan panjang, dan belum dapat dilakukan secara langsung ke tangan petani. Hal ini sesuai dengan pola distribusi tidak langsung, di mana dibutuhkan perantara dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen akhir.

Adapun alur distribusi pupuk bersubsidi juga diperkuat oleh pernyataan dari pihak distributor, Ibu Fajar selaku perwakilan dari CV Mekar Tani, yang menyatakan bahwa proses pendistribusian dimulai dari dua produsen besar, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik. Setelah pupuk diterima oleh distributor, kemudian disalurkan ke pengecer resmi, dalam hal ini UD Sahabat Tani, yang menjadi tempat bagi petani melakukan pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Dalam wawancaranya, Ibu Fajar menjelaskan:

Kami ambil pupuk dari dua produsen, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia. Setelah itu ke distributor, lalu ke pengecer, seperti UD Sahabat Tani, dan barulah petani melakukan pembelian di sana menggunakan kartu tani.⁷³



Gambar 4.1 Alur Penyaluran Pupuk Subsidi di Kelurahan Teppo

Sumber data : Dikelolah oleh peneliti,2025.

⁷² Sitti Hasnah, Badan Penyuluhan Pertanian, Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 15 Mei 2025.

⁷³ Fajar, Distributor CV. Mekar Tani, Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 26 Mei 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa alur distribusi yang diterapkan di Kelurahan Teppo adalah model distribusi tidak langsung, dengan beberapa tahapan perantara dari produsen hingga petani sebagai konsumen akhir. Pola ini sesuai dengan model distribusi produsen → distributor → pengecer → petani, yang dalam teori distribusi mengandung risiko keterlambatan, penimbunan, atau bahkan ketidaktepatan kuota jika tidak diawasi dengan baik. Setelah pupuk sampai di pengecer, petani dapat membeli pupuk subsidi dengan membawa kartu tani dan KTP. Proses transaksi dilakukan dengan menggesek kartu tani pada mesin EDC.

2. Kendala yang dialami dalam proses penyaluran pupuk subsidi khususnya di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

Dalam proses penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat kelancaran dan ketepatan distribusinya kepada petani. Agar penyaluran pupuk subsidi dapat berlangsung dengan baik dan tepat sasaran, maka penting bagi seluruh pihak yang terlibat untuk menerapkan prinsip 6T yaitu :

a. Tepat jenis

Tidak terdapat permasalahan yang signifikan terkait dengan prinsip tepat jenis dalam proses penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo. Secara umum, jenis pupuk yang disalurkan kepada petani, yaitu Urea dan NPK Phonska, sudah sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian di wilayah tersebut. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari beberapa petani yang menyatakan bahwa jenis pupuk yang mereka terima memang sudah tepat.

Selama ini pupuk yang kami terima melalui sistem Kartu Tani sudah sesuai dengan kebutuhan kami di lapangan. Jenisnya yaitu Urea dan Poska (NPK Phonska), dan itu memang jenis pupuk yang biasa kami gunakan untuk tanaman padi. Dari segi jenis, tidak ada masalah karena sesuai

dengan lahan dan pola tanam di sini. Jadi, kami merasa tidak ada yang perlu dikeluhkan dari jenis pupuk yang diberikan.⁷⁴

Sampai sekarang, kami tidak pernah menerima jenis pupuk yang tidak dikenal atau berbeda dari yang biasanya kami pakai. Semua yang kami dapatkan, baik itu Urea maupun Phonska, memang sudah sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan kami sebagai petani. Jadi menurut saya, soal jenis pupuk, tidak ada kendala. Yang jadi masalah kadang bukan jenisnya, tapi jumlah dan waktunya yang kadang terlambat.⁷⁵

b. Tepat jumlah

Prinsip *tepat jumlah* berarti petani menerima pupuk subsidi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan pupuk yang diajukan benar-benar terpenuhi secara penuh dan adil.

Namun, di Kelurahan Teppo, prinsip tepat jumlah belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak petani menyatakan bahwa mereka tidak menerima pupuk subsidi sesuai jatah yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini disebabkan oleh stok pupuk yang terbatas di tingkat pengecer, sehingga dilakukan pembatasan distribusi.

⁷⁴ Sudirman, “Petani,” Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 28 Mei 2025, n.d.

⁷⁵ Surifno, “Petani,” Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025, n.d.

Kecamatan : PATAMPANUA

Desa/Kelurahan : TEPPU

Kelompok Tani : Massiddi Adae II

Subsektor : TANAMAN PANGAN

Komoditas : PADI

Kios : RT0000037106 - SAHABAT TANI, UD

Bagian : 1 / 0

NIK	Nama	Rencana Tanam(Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi(Kg)											
			UREA				NPK				NPK FORMULA			
			MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML
6473032409730004	DARWIS	1.600	150	150	0	300	100	100	0	200	0	0	0	0
6473041108810001	SUDIRMAN	0.600	50	50	0	100	50	50	0	100	0	0	0	0
7314030107940137	NASARUDDIN	1.000	100	100	0	200	50	50	0	100	0	0	0	0
7315050101700023	HAMID	2.000	200	200	0	400	150	150	0	300	0	0	0	0
7315050101780001	SAMAILA	1.500	150	150	0	300	100	100	0	200	0	0	0	0
7315050201620001	TONANG	2.000	200	200	0	400	150	150	0	300	0	0	0	0
7315050202820002	Satril	1.000	100	100	0	200	50	50	0	100	0	0	0	0
7315050303650001	ABD HALIM	2.000	200	200	0	400	150	150	0	300	0	0	0	0

Gambar 4.2 Jatah Kuota Pupuk Sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani

Sumber data : Didapatkan dari pihak pengecer

Kami hanya bisa ambil setengah dari jatah pupuk. Katanya stok di kios tidak cukup. Padahal kami butuh semuanya saat itu juga.⁷⁶

Kadang cuma bisa ambil dua karung dari jatah empat, katanya belum ada tambahan kiriman. Jadi mau tidak mau kami beli pupuk nonsubsidi, walaupun mahal.⁷⁷

Pihak pengecer mengonfirmasi bahwa pembatasan pengambilan jatah dilakukan karena stok pupuk subsidi di gudang mereka sering kali terbatas.

Kami memang kadang batasi dulu, karena stok cepat habis. Kalau semua petani ambil penuh, tidak cukup sampai kiriman berikutnya datang.⁷⁸

Namun demikian, menurut distributor, distribusi sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat, dan stok bisa segera tersedia jika pengecer melakukan pemesanan secara rutin dan teratur.

⁷⁶ Wahyudin, "Petani," Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025, n.d.

⁷⁷ Sinar, "Petani," Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025, n.d.

⁷⁸ Cappe Hudong, "Pengecer UD. Sahabat Tani Patampanua," Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 15 Mei 2025, n.d.

Kalau mereka pesan lengkap, kami bisa kirim dalam satu hari. Tapi sering kali pengecer lambat ajukan, atau nunggu banyak dulu baru pesan, itu yang bikin kosong.⁷⁹

Permasalahan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan petani dan manajemen stok di tingkat pengecer. Meskipun jatah pupuk sudah ditetapkan secara administratif, dalam pelaksanaannya petani tidak mendapat jumlah yang sesuai karena stok di lapangan tidak memadai.

Dampaknya, petani harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal, yang tentu memberatkan terutama bagi petani kecil. Kondisi ini juga dapat memicu ketimpangan hasil panen dan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan petani.

c. Tepat waktu

Prinsip *tepat waktu* mengacu pada ketepatan distribusi pupuk subsidi sesuai jadwal kebutuhan tanam petani. Ketepatan ini sangat penting karena proses pemupukan memiliki waktu ideal tertentu untuk mendukung pertumbuhan tanaman, terutama pada tahap awal pertumbuhan padi.

Namun, dalam pelaksanaannya, prinsip ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik di Kelurahan Teppo. Beberapa petani menyatakan bahwa mereka sering mengalami keterlambatan dalam memperoleh pupuk subsidi, terutama menjelang musim tanam.

Kadang pupuk datangnya telat, padahal waktu tanam sudah dekat. Kami harus menunda pemupukan awal karena belum ada pupuknya.⁸⁰

Kami sudah siapkan lahan, tinggal kasih pupuk. Tapi pupuk subsidi belum juga datang, jadi terpaksa pakai yang nonsubsidi, mahal sekali.⁸¹

⁷⁹ Fajar, "Distributor CV. Mekar Tani."

⁸⁰ Abd.Hakim, "Petani," Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025, n.d.

⁸¹ Safiuddin, "Petani," Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025, n.d.

Pihak pengecer mengungkapkan bahwa keterlambatan sering terjadi karena proses pemesanan dari distributor memakan waktu, terutama jika pemesanan dilakukan secara kolektif dan menunggu permintaan dari petani lain.

Kalau stok habis dan kami pesan, kadang tunggu sampai seminggu baru datang lagi. Jadi memang terlambat juga.⁸²

Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan dari pihak distributor yang mengatakan bahwa pengiriman bisa dilakukan dalam waktu satu hari apabila pesanan diajukan secara tepat.

Kalau ada pesanan masuk, kami bisa proses dan kirim dalam satu hari. Biasanya yang bikin lama itu pengecer nunggu dulu baru ajukan, atau dokumen belum lengkap. Sesuai gambar di bawah, pihak pengecer seringkali melakukan pemesanan. Kami tidak pernah menunda pengiriman jika pesanan sudah masuk. Jadi kalau terjadi kekosongan pupuk, kemungkinan besar itu karena pengecer belum mengajukan permintaan ulang.

No	Nomor SK	Tanggal Kirim	GUSA	SIK	SAKAB	SAK	SP-38	SPS	SAKAB	Keterangan
1	3493201917	05 Desember 2024	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	3493201947	10 Desember 2024	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	3493201954	27 Desember 2024	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	3493202072	11 Desember 2024	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	3493202079	13 Desember 2024	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	3493202079	16 Desember 2024	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	3493202435	16 Desember 2024	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	3493202435	23 Desember 2024	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
9	3493202127	27 Desember 2024	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	3493202932	28 Desember 2024	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	3493203161	30 Desember 2024	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
12	3493203481	31 Desember 2024	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Grand Total			84,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Gambar 4.3 Serah terima pupuk UD. Sahabat Tani

Sumber data : Pihak distributor CV Mekar Tani

⁸² Cappe Hudong, "Pengecer UD. Sahabat Tani Patampanua."

Perbedaan keterangan antara pengecer dan distributor menunjukkan adanya masalah koordinasi dan manajemen logistik yang belum optimal. Hal ini menjadi penyebab utama keterlambatan yang dirasakan oleh petani.

Keterlambatan dalam pemenuhan pupuk subsidi berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian. Pemupukan yang terlambat bisa menurunkan hasil panen, meningkatkan biaya produksi, serta mengganggu siklus tanam berikutnya.

d. Tepat mutu

Prinsip *tepat mutu* dalam penyaluran pupuk subsidi berarti bahwa pupuk yang diterima oleh petani harus memiliki kualitas yang sesuai standar—baik dari segi kandungan unsur hara, bentuk fisik, maupun daya guna bagi tanaman. Pupuk yang bermutu akan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal dan mencegah kerusakan pada tanah serta tanaman itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani di Kelurahan Teppo, secara umum tidak ditemukan keluhan yang berarti terkait mutu pupuk subsidi yang mereka terima. Petani menyatakan bahwa pupuk subsidi seperti Urea dan NPK Phonska yang mereka peroleh masih dalam kondisi baik dan sesuai dengan standar mutu yang dibutuhkan.

Selama ini pupuk yang kami terima bagus-bagus saja. Tidak pernah kami temukan yang menggumpal atau basah.⁸³

Kalau dari segi kualitas pupuk, sejauh ini aman. Bentuknya normal, warnanya sesuai, dan saat digunakan di lahan, hasilnya juga terlihat.⁸⁴

⁸³ Andini, “Petani.”

⁸⁴ Basir, “Petani,” Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025, n.d.

Hal ini juga diperkuat oleh pihak pengecer yang memastikan bahwa pupuk yang mereka terima dari distributor merupakan produk resmi dari produsen yang telah memenuhi standar mutu nasional.

Kami hanya terima pupuk resmi dari distributor, tidak pernah campur. Kalau ada karung yang rusak atau pupuk yang menggumpal, langsung kami kembalikan.⁸⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *tepat mutu* telah terlaksana dengan baik di Kelurahan Teppo. Mutu pupuk yang baik juga menjadi salah satu faktor yang membuat petani tetap bergantung pada pupuk bersubsidi, karena selain harganya yang terjangkau, kualitasnya pun dapat diandalkan.

e. *Tepat tempat*

Prinsip *tepat tempat* dalam penyaluran pupuk subsidi mengacu pada distribusi pupuk yang dilakukan di lokasi yang sesuai secara administratif dan mudah dijangkau oleh petani. Di Kelurahan Teppo, prinsip ini telah berjalan dengan baik karena pupuk disalurkan melalui kios pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, para petani menyatakan tidak mengalami hambatan dalam mengambil pupuk dari sisi lokasi. Pengecer yang ditunjuk berada di tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh petani setempat.

Kami ambil pupuk di kios biasa, tempatnya gampang diakses, jadi sejauh ini tidak ada masalah soal lokasi.⁸⁶

Penyaluran dilakukan di kios resmi, dan petani di sini sudah tahu tempatnya. Tidak pernah kami arahkan ke tempat lain.⁸⁷

⁸⁵ Cappe Hudong, "Pengecer UD. Sahabat Tani Patampanua."

⁸⁶ Hj. Siarah, "Petani," *Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025*, n.d.

⁸⁷ Cappe Hudong, "Pengecer UD. Sahabat Tani Patampanua."

Distribusi yang dilakukan di tempat yang tepat ini turut menunjang efektivitas program subsidi pupuk, karena petani tidak perlu menempuh jarak jauh atau menghadapi kesulitan dalam memperoleh pupuk. Dengan demikian, prinsip *tepat tempat* dalam penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo dapat dikatakan telah terlaksana secara optimal.

f. Tepat harga

Prinsip *tepat harga* menekankan bahwa pupuk subsidi harus dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari prinsip ini adalah agar petani mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau sesuai ketentuan, tanpa adanya mark-up atau kenaikan harga dari pihak pengecer. Ketentuan HET ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

Namun, pelaksanaan prinsip ini di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa petani mengaku bahwa harga pupuk subsidi yang mereka bayarkan tidak sesuai dengan harga HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pupuk NPK kami beli Rp120.000 per sak (50 kg), sedangkan pupuk urea Rp115.000 per sak. Padahal katanya harga HET Urea itu Rp112.500 dan NPK Phonska Rp115.000. Jadi memang ada selisih.⁸⁸

*Harga pupuk subsidi tidak pernah sama dengan yang tertulis di pengumuman. Kami tidak tahu apakah memang harganya naik atau pengecer yang menaikkan sendiri.*⁸⁹

⁸⁸ Sudirman, "Petani."

⁸⁹ Hamzah, "Petani," Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 28 Mei 2025, n.d.

Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian harga yang cukup sering terjadi di lapangan. Gambar berikut memperlihatkan ketentuan resmi Harga Eceran Tertinggi pupuk subsidi yang menjadi acuan:

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI	
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022	
JENIS PUPUK	HARGA PER KG
PUPUK UREA	Rp 2.250,-
PUPUK NPK PHONSKA	Rp 2.300,-
PUPUK NPK UNTUK KAKAO	Rp 3.300,-

Berdasarkan Permentan 10 Tahun 2022 HET berlaku untuk pembelian pupuk bersubsidi oleh petani yang melakukan usaha tani sebagai berikut:
a. Petani tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai), Hortikultura (Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih); dan / atau Perkebunan (Tebu Rakyat, Kakao, Kopi) dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
b. Petani tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Gambar 4.4 Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi

Sumber data : Ketetapan pemerintah Inadonesia

Berdasarkan data di atas, selisih harga yang terjadi di lapangan adalah Pupuk Urea: Harga HET Rp112.500, harga di lapangan Rp115.000 → selisih Rp2.500 per sak sedangkan Pupuk NPK Phonska: Harga HET Rp115.000, harga di lapangan Rp120.000 → selisih Rp5.000 per sak

Meskipun perbedaan tersebut terlihat kecil secara nominal, namun bagi petani dengan jumlah pembelian besar, selisih ini berdampak pada meningkatnya biaya produksi, terutama jika terjadi secara terus-menerus dalam setiap musim tanam.

Beberapa pengecer berdalih bahwa perbedaan harga ini disebabkan oleh biaya transportasi tambahan dari gudang distributor, serta kondisi pasokan yang seringkali tidak stabil. Namun demikian, alasan tersebut tidak sejalan dengan regulasi resmi dan tetap perlu pengawasan dari pemerintah dan instansi terkait.

3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

Penyaluran pupuk subsidi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai pelaku usaha seperti distributor, pengecer, dan konsumen (petani). Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus mencerminkan nilai-nilai syariah yang mencakup kejujuran, amanah, transparansi, serta menghindari unsur-unsur yang merugikan pihak lain. Dalam hal ini, sistem penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Arafah dalam bukunya *Etika Pelaku Bisnis Islam*.

1) Bersikap Jujur

Kejujuran menjadi prinsip utama dalam transaksi bisnis menurut Islam. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara harga pupuk subsidi yang seharusnya (berdasarkan HET) dengan harga yang dibayarkan oleh petani.

Pupuk NPK kami beli Rp120.000 per sak (50 kg), sedangkan pupuk urea Rp115.000 per sak (50 kg). Padahal katanya harga HET urea itu Rp112.500 sedangkan NPK Rp115.000.⁹⁰

Harga pupuk subsidi tidak pernah sama dengan yang tertulis di pengumuman. Kami tidak tahu apakah memang naik atau pengecer yang menaikkan sendiri.⁹¹

Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakjujuran dari pihak pengecer dalam menetapkan harga. Dalam Islam, tindakan seperti ini termasuk ke dalam praktik yang tidak dibenarkan karena dapat merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan.

2) Bersikap Amanah

⁹⁰ Sudirman, "Petani."

⁹¹ Hamzah, "Petani."

Prinsip amanah dalam konteks ini menuntut para penyalur untuk menyalurkan pupuk sesuai kuota dan ketentuan pemerintah, serta menjaga kepercayaan petani. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pengecer tidak mendistribusikan pupuk sesuai jumlah dalam RDKK karena alasan keterbatasan stok.

Kami sering hanya diberi setengah dari jatah karena katanya pupuknya belum masuk semua. Padahal pupuk sudah mau dipakai.⁹²

Meskipun terdapat kendala distribusi, sikap amanah seharusnya tetap dijaga dengan cara memberikan informasi yang transparan, serta tidak memanfaatkan kelangkaan untuk keuntungan sepihak. Ketidaksesuaian waktu pengiriman antara pengecer dan distributor juga menunjukkan adanya kekurangan dalam menjalankan amanah.

Kalau kami pesan pupuk ke distributor, mereka bilang butuh seminggu.⁹³

Kalau pengecer pesan, kami bisa kirim hari itu juga atau paling lambat besok.⁹⁴

sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah SWT berfirman:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.⁹⁵

Ayat ini memperkuat pentingnya menjaga amanah dalam segala bentuk tanggung jawab, termasuk dalam mendistribusikan bantuan atau subsidi agar tidak terjadi ketimpangan ataupun kerugian sosial dan ekonomi di kalangan

⁹² Sumaini, "Petani," *Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025*, n.d.

⁹³ Cappe Hudong, "Pengecer UD. Sahabat Tani Patampanua."

⁹⁴ Fajar, "Distributor CV. Mekar Tani."

⁹⁵ Kementerian Agama, "Al Qur'an Dan Terjemahannya," <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>. (8:27), 2022.

masyarakat, khususnya petani kecil. Perbedaan informasi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan yang dapat mengganggu kepercayaan antara pihak-pihak terkait.

3) Menghindari Unsur Riba, Gharar, dan Maysir

Sistem penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani semestinya bebas dari unsur riba, ketidakpastian (gharar), dan spekulasi (maysir). Namun, ketika harga pupuk dijual melebihi HET tanpa kejelasan, hal tersebut dapat menimbulkan unsur gharar, karena petani tidak mendapatkan kejelasan tentang harga sebenarnya.

Selain itu, ketika petani tidak mendapatkan pupuk subsidi sesuai jatah, mereka harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal. Praktik semacam ini, jika disengaja untuk keuntungan sepihak, dapat masuk dalam kategori penipuan atau eksploitasi yang dilarang dalam Islam.

4) Menjauhi Penipuan dan Berpegang pada Nasihat

Penyalur yang baik seharusnya menjauhi penipuan dan senantiasa memberikan informasi yang benar kepada petani. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, beberapa petani mengeluhkan kurangnya informasi dan transparansi dari pengecer, terutama terkait harga dan jumlah pupuk yang tersedia.

Kami tidak tahu apakah pupuk memang naik atau tidak. Kadang harga berubah tapi tidak ada penjelasan.⁹⁶

Dalam ajaran Islam, setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara terang-terangan dan saling ridha, serta menghindari manipulasi informasi. Dalam konteks distribusi pupuk subsidi, ketidakjelasan harga dan ketersediaan stok dapat merugikan petani dan bertentangan dengan prinsip jual beli yang islami.

⁹⁶ Hj. Siarah, “Petani.”

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

Sistem penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang pada dasarnya telah mengikuti struktur distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dimulai dari produsen, kemudian disalurkan kepada distributor, pengecer resmi, hingga akhirnya diterima oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani. Penyaluran ini dilakukan melalui sistem berbasis digital dengan pemanfaatan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang terhubung dengan aplikasi SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Namun, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial yang menghambat efektivitas penyaluran. Salah satu pola dominan yang muncul dari temuan lapangan adalah bahwa mayoritas petani belum memahami secara menyeluruh cara kerja Kartu Tani, sehingga mereka sangat bergantung pada penyuluh atau pengecer dalam proses transaksi.

Selain itu, ditemukan pula bahwa kuota pupuk yang diterima melalui kartu sering kali tidak sesuai dengan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), baik dari segi waktu pengisian maupun jumlahnya. Hal ini berdampak pada tertundanya masa tanam dan terhambatnya kegiatan pertanian secara keseluruhan. Penyaluran yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai kebutuhan juga menyebabkan petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Bahkan, sebagian petani mengeluhkan bahwa harga pupuk subsidi yang mereka tebus melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku.

Jika ditinjau dari teori distribusi menurut Ruslan Noor, sistem distribusi idealnya harus berfungsi menciptakan pemerataan akses terhadap kebutuhan pokok secara adil dan efisien. Namun dalam konteks Kelurahan Teppo, sistem

distribusi pupuk subsidi melalui Kartu Tani belum mampu mewujudkan prinsip tersebut. Begitu pula menurut Tjiptono, efektivitas saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu, ketersediaan barang, dan kemudahan akses bagi konsumen. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut belum optimal, terutama dalam hal waktu dan jumlah penyaluran. Dari sudut pandang prinsip 6T yang mencakup tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu, hanya sebagian yang terpenuhi. Tepat jenis dan tempat masih dapat dikatakan cukup terlaksana, tetapi tepat jumlah, waktu, dan harga masih menjadi masalah serius yang berpotensi menurunkan produktivitas petani.

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi barang harus mencerminkan nilai-nilai keadilan (al-‘adl), amanah, keterbukaan, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba dan gharar. Sistem penyaluran pupuk subsidi di Teppo belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Ketika petani tidak mendapatkan haknya sesuai dengan data RDKK dan harga yang dibayarkan melebihi HET, maka di situ terdapat unsur ketidakadilan dan penyimpangan dari nilai syariah. Transparansi juga menjadi isu karena sebagian petani tidak mendapat informasi yang jelas terkait harga dan kuota pupuk mereka. Dalam konteks ini, sistem yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat justru menimbulkan keresahan di kalangan petani, sehingga nilai masalah tidak tercapai.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu seperti penelitian Triwati yang menekankan pada lemahnya sosialisasi penggunaan Kartu Tani,⁹⁷ temuan di Teppo sangat bertolak belakang dengan hal tersebut, di mana petani di Teppo telah memahami secara penuh fungsi dan cara penggunaan kartu. Penelitian Ade Rahmawati di Tasikmalaya menyatakan bahwa sistem kartu tani efektif jika

⁹⁷ Triwati, “Implementasi Kebijakan Kartu Tani Di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.”

dijalankan dengan prinsip ketepatan kuota dan waktu,⁹⁸ sedangkan temuan di Teppo menggunakan prinsip 6T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat mutu dan tepat tempat pupuk). Penelitian Ronal Kurniawandi Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa sekitar 38% petani kesulitan menggunakan kartu tani,⁹⁹ kondisi tersebut bertolak belakang dengan hasil temuan yang mana para petani di Teppo telah memahami penggunaan kartu tani dalam sistem penyaluran pupuk subsidi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran kontekstual yang lebih spesifik bahwa sistem penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo telah berjalan secara optimal, baik dari sisi teknis maupun dari perspektif ekonomi syariah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Walaupun demikian, dalam proses penyaluran pupuk subsidi di Teppo masih mengalami beberapa kendala dan hambatan.

2. Kendala yang dialami dalam proses penyaluran pupuk subsidi khususnya di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

Meskipun sistem penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo telah diimplementasikan sesuai dengan struktur distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses tersebut masih menghadapi berbagai kendala serius yang menghambat efektivitas dan keadilan distribusi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap penyuluh, pengecer, distributor, dan petani, ditemukan beberapa pola utama yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini. Pertama, keterlambatan pengisian kuota dalam sistem SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian), yang menyebabkan petani tidak dapat menebus pupuk tepat waktu sesuai masa tanam. Masalah ini sangat mengganggu ritme pertanian, terutama ketika masa tanam sudah tiba namun pupuk belum dapat diakses. Kedua, stok pupuk yang tidak stabil di tingkat pengecer, sehingga petani yang telah memiliki

⁹⁸ Ade Rahmawati, Ulpah Jakiyah, and Dona Setia Umbara, "Efektivitas Kartu Tani Terhadap Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kelurahan Cibutei Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya."

⁹⁹ Kurniawan, Azuz, and Nurlaela, "Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Kartu Tani Pada Pupuk Bersubsidi Di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang."

kartu tani dan kuota yang sah tetap tidak dapat memperoleh pupuk sesuai haknya. Hal ini terjadi karena keterlambatan pasokan dari distributor kepada pengecer atau karena distribusi tidak berjalan sesuai skema yang ditetapkan.

Ketiga, harga pupuk subsidi di lapangan yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) juga menjadi kendala yang sangat meresahkan petani. Dalam beberapa kasus, petani mengaku membayar pupuk dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan, baik karena adanya biaya tambahan yang tidak jelas atau karena praktik mark-up oleh pihak tertentu. Keempat, gangguan jaringan mesin EDC saat transaksi penebusan pupuk turut memperlambat proses, bahkan memaksa petani untuk datang berkali-kali ke kios hanya untuk satu kali penebusan. Kelima, kurangnya pemahaman dan literasi digital petani, menyebabkan mereka kesulitan dalam menggunakan Kartu Tani secara mandiri. Banyak di antara mereka masih bergantung kepada penyuluh atau pengecer untuk proses transaksi. Keenam, validitas data RDKK yang tidak sesuai dengan kondisi aktual menyebabkan ketidaktepatan penyaluran, karena ada petani yang berhak namun tidak masuk data, atau sebaliknya.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem distribusi Ruslan Noor, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran yang seharusnya mendistribusikan pupuk secara merata dan efisien, justru masih mengalami ketidaktepatan akibat lemahnya intervensi teknis dan administratif. Ketimpangan distribusi ini membuka peluang terjadinya ketidakadilan ekonomi, di mana petani kecil menjadi pihak yang paling dirugikan. Lebih lanjut, berdasarkan prinsip 6T (tepat jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat), hampir semua aspek mengalami hambatan. *Tepat waktu* tidak tercapai karena keterlambatan pengisian kuota dan gangguan jaringan. *Tepat jumlah* dan *tepat harga* juga belum terpenuhi karena kuota tidak sesuai RDKK dan harga di atas HET. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip efisiensi distribusi belum dapat diaktualisasikan secara menyeluruh dalam sistem Kartu Tani di Kelurahan Teppo.

Dalam kerangka ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *keadilan* (*al-‘adl*) dan *transparansi* (*amanah*) dalam muamalah. Ketika petani tidak memperoleh hak mereka karena sistem yang tidak akurat atau praktik penimbunan dan mark-up harga, maka distribusi tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berpotensi menimbulkan *kezaliman*. Sistem yang seharusnya menghadirkan manfaat sosial (*maslahah*) justru memunculkan ketimpangan dan kerugian bagi pihak yang lemah, yaitu petani kecil. Dalam konteks ini, nilai-nilai distribusi Islami belum tercermin dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk yang berbasis digital tersebut. Padahal, distribusi menurut syariah harus menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan secara adil, terjangkau, dan bebas dari eksploitasi.

Temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Triwati di Magelang yang menemukan bahwa lemahnya sosialisasi dan keterbatasan pemahaman petani menjadi kendala utama dalam implementasi Kartu Tani.¹⁰⁰ Adapun penelitian Ade Rahmawati yang menyoroti pentingnya ketepatan waktu dan kuota sebagai indikator utama keberhasilan program kartu tani.¹⁰¹ Dalam penelitian ini, justru ada tiga indikator yang menjadi titik fokus utama di Kelurahan Teppo yaitu harga, waktu serta jumlah. Sementara itu, Ronal Kurniawan menegaskan bahwa literasi petani terhadap penggunaan kartu tani di Pinrang masih rendah,¹⁰² berbeda dengan kondisi yang ditemukan di Teppo. Dengan demikian, kendala yang terjadi di Kelurahan Teppo bukan hanya bersifat lokal, tetapi juga merupakan refleksi dari persoalan struktural dan implementatif pada program subsidi pupuk nasional secara lebih luas.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo masih

¹⁰⁰ Triwati, “Implementasi Kebijakan Kartu Tani Di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.”

¹⁰¹ Ade Rahmawati, Ulpah Jakiyah, and Dona Setia Umbara, “Efektivitas Kartu Tani Terhadap Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.”

¹⁰² Kurniawan, Azuz, and Nurlaela, “Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Kartu Tani Pada Pupuk Bersubsidi Di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.”

menghadapi kendala yang kompleks dan berlapis. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut aspek etika distribusi dalam perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan regulasi yang ada, serta penguatan literasi petani dan kapasitas teknis pelaksana lapangan agar penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar adil, tepat, dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tani.

3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

Dari perspektif ekonomi Islam, sistem penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang idealnya mengedepankan nilai-nilai utama dalam distribusi Islam, yaitu *keadilan (al-'adl)*, *amanah*, *transparansi (shidq)*, serta menghindari unsur *riba* dan *gharar*. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap penyuluh pertanian, petani, distributor, dan pengecer, ditemukan bahwa pelaksanaan program ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pola utama yang muncul adalah adanya ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan pupuk subsidi, baik dari segi keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian harga dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), maupun ketidakjelasan informasi terkait kuota dan waktu penebusan pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam distribusi—di mana setiap petani yang berhak seharusnya memperoleh pupuk sesuai kebutuhannya—belum sepenuhnya ditegakkan.

Lebih jauh, praktik di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan amanah dan keterbukaan informasi. Sebagian petani tidak mengetahui secara pasti jumlah kuota pupuk yang sebenarnya mereka miliki, atau mengapa mereka tidak menerima pupuk sesuai dengan luas lahan dalam RDKK. Dalam beberapa kasus, petani bahkan harus membayar lebih dari harga subsidi yang ditetapkan, yang mencerminkan adanya praktik mark-up atau pungutan yang tidak transparan. Dalam ekonomi Islam, ketidakjelasan atau ketidakpastian seperti ini

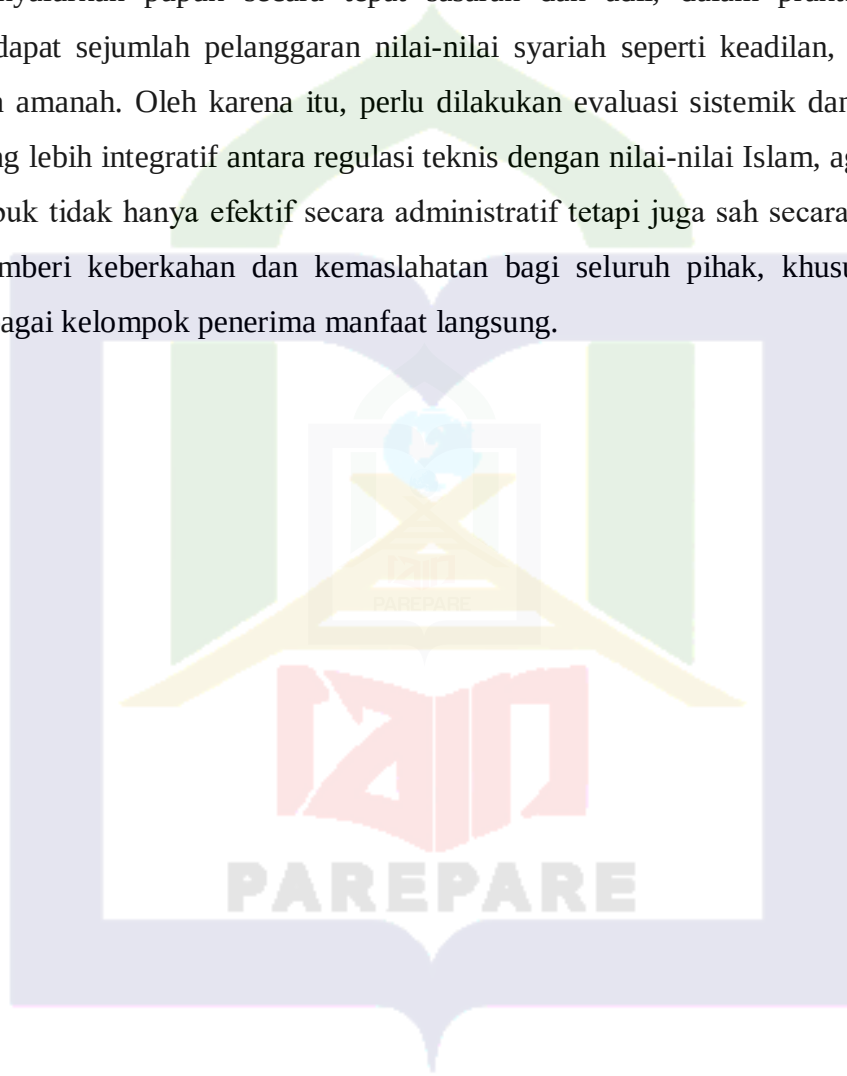
dikategorikan sebagai *gharar*, yang dilarang dalam transaksi karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, ketika pihak yang lebih kuat dalam rantai distribusi (pengecer/distributor) menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil keuntungan lebih, maka hal ini mengandung unsur *riba* dan *zalim*, yang secara tegas ditolak dalam sistem muamalah Islam sebagaimana termaktub dalam QS. Ali Imran ayat 130.

Konsep distribusi dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori ekonomi syariah, tidak hanya berfokus pada pemindahan barang dari satu pihak ke pihak lain, melainkan juga pada keseimbangan kepentingan, kemaslahatan (masalah) umum, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah (mustadh'afin). Dalam konteks ini, sistem penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani yang belum menjamin kepastian akses dan perlakuan yang adil terhadap petani kecil, dapat dikatakan belum mencerminkan prinsip *maslahah*. Ketika petani harus membeli pupuk non-subsidi karena kelangkaan pupuk subsidi atau tidak jelasnya informasi dari pengecer, maka sistem ini gagal menjadi instrumen pemerataan dan keberkahan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Bahkan, distribusi yang menyulitkan, menunda, atau merugikan petani bisa dikategorikan sebagai distribusi yang cacat secara syariah karena tidak memenuhi maqashid al-syariah (tujuan syariat), yaitu menjaga harta, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

Temuan ini juga memperkuat penelitian terdahulu. Penelitian Triwati menyebutkan bahwa kelemahan sosialisasi dan literasi petani membuat banyak aspek syariah dalam distribusi belum diterapkan, seperti prinsip *tabligh* (menyampaikan informasi) dan *amanah*.¹⁰³ Dalam konteks Kelurahan Teppo, kondisi ini berbeda karena informasi antara pengecer dan petani telah seimbang, serta kuatnya pengawasan terhadap distribusi pupuk.

¹⁰³ Triwati, "Implementasi Kebijakan Kartu Tani Di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang."

Secara keseluruhan, sistem penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo telah berjalan optimal tetapi belum mampu menunjukkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara utuh karena kendala dan hambatan yang dialami. Meskipun program ini memiliki tujuan baik, yaitu menyalurkan pupuk secara tepat sasaran dan adil, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah pelanggaran nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan amanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi sistemik dan pendekatan yang lebih integratif antara regulasi teknis dengan nilai-nilai Islam, agar distribusi pupuk tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga sah secara syar'i, serta memberi keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak, khususnya petani sebagai kelompok penerima manfaat langsung.



BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang serta analisisnya dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang menggunakan pola distribusi tidak langsung, yang melibatkan produsen, distributor, pengecer, dan petani sebagai penerima akhir. Proses ini diawali dengan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dilanjutkan dengan pemesanan pupuk oleh pengecer melalui distributor, dan distribusi kepada petani menggunakan kartu tani. Meskipun sistem ini sudah mengikuti prosedur administratif, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala di lapangan.
2. Kendala dalam proses penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo meliputi hambatan teknis dan administratif, antara lain gangguan jaringan saat transaksi kartu tani, keterlambatan pengisian kuota pupuk oleh petugas penyuluh, terbatasnya stok pupuk pada masa tanam, harga pupuk subsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, ditemukan pula permasalahan dalam validitas data petani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kendala-kendala ini menyebabkan program subsidi tidak sepenuhnya berjalan sesuai prinsip 6T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat harga), serta berdampak langsung pada kesejahteraan petani sebagai penerima manfaat.
3. Perspektif Ekonomi Islam terhadap sistem penyaluran ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti *amanah* (tanggung jawab), *al-'adl* (keadilan), dan *tabligh* (keterbukaan informasi) belum sepenuhnya diimplementasikan. Beberapa praktik

seperti keterlambatan, harga pupuk di atas HET, serta ketidaktepatan sasaran subsidi bertentangan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dalam distribusi dana publik. Oleh karena itu, reformasi sistem penyaluran sangat diperlukan agar dapat menghadirkan keadilan distribusi, keberkahan dalam pengelolaan subsidi, serta perlindungan terhadap hak-hak petani sebagai penerima manfaat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Instansi Terkait, seperti Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP), diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap proses penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani. Pengawasan yang ketat dapat mencegah keterlambatan input kuota, ketidaksesuaian harga dengan HET, serta menjamin pupuk sampai tepat waktu sesuai dengan masa tanam petani. Serta membentuk tim monitoring dan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi yang terdiri dari unsur pemerintah, penyuluh pertanian, dan tokoh agama lokal. Tim ini dapat berperan aktif dalam mengawasi penyaluran pupuk, menerima laporan keluhan dari petani, dan memastikan tidak terjadi penimbunan ataupun penyimpangan kuota di lapangan. Dengan demikian, sistem distribusi pupuk subsidi diharapkan dapat berjalan lebih baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjunjung kejujuran, keadilan, serta keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi
2. Kepada Penyuluh Pertanian, agar lebih disiplin dan konsisten dalam melakukan pengisian kuota pupuk pada sistem kartu tani. Keterlambatan dalam penginputan kuota berdampak langsung pada kelancaran distribusi dan keberlangsungan usaha tani petani. Diperlukan pelatihan berkala dalam pengelolaan sistem berbasis digital serta peningkatan akurasi data RDKK.
3. Kepada Pengecer dan Distributor, hendaknya menjaga integritas dan kejujuran dalam penyaluran pupuk subsidi, terutama dalam hal penetapan harga jual sesuai

HET. Praktik markup harga sangat merugikan petani dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam distribusi. Pengecer juga perlu berperan aktif dalam menjelaskan prosedur penebusan pupuk kepada petani yang belum memahami penggunaan kartu tani, perlu dilakukan pelatihan dan edukasi secara rutin kepada para pengecer terkait prosedur penggunaan Kartu Tani serta pentingnya prinsip 6T dalam distribusi pupuk, yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga. Selain itu, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam transaksi perlu ditanamkan agar proses distribusi dapat berjalan secara adil dan berkah.

4. Kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian, disarankan untuk memperkuat infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet dan perangkat EDC, agar transaksi kartu tani dapat berjalan lancar. Ketergantungan pada sistem digital menuntut kesiapan sarana yang memadai, terutama di wilayah peKelurahan yang masih minim akses jaringan, disarankan juga untuk membangun sistem pengawasan stok pupuk berbasis digital secara real-time. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan pengecer, distributor, kelompok tani, serta penyuluh pertanian dalam satu platform, sehingga informasi ketersediaan pupuk dapat dipantau secara transparan dan akurat. Aplikasi ini dapat berbasis Android dan terhubung langsung dengan Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI), agar setiap transaksi dan alokasi pupuk tercatat secara otomatis.
5. Kepada Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan petani terhadap sistem kartu tani, serta efektivitas program subsidi dalam meningkatkan hasil pertanian secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdurrozzaq Hasibuan, Suhela Putri Nasution, et al.. “Strategi Peningkatan Usaha Tani Padi Sawah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa.” *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi* 1, no. 4 (2022): 477–90. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i4.1095>.
- Achjar, Komang Ayu Henny, et al. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ade Rahmawati, Ulpah Jakiyah, dan Dona Setia Umbara. “Efektivitas Kartu Tani Terhadap Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kelurahan Cibenti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Tanaman* 2, no. 1 (2023): 08–24. <https://doi.org/10.55606/jurrit.v2i1.1230>.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustmail Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Adnyana, I Putu Cakra Putra, dan Muhammad Saleh Mohktar. “Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah Di Provinsi Ntb.” *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 13, no. 2 (2019): 201. <https://doi.org/10.24843/soca.2019.v13.i02.p05>.
- Afdhal, Afdhal, Moh Fakhrurozi, et al. *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Akbar, Ali, Muhammad Kamal Zubair, dan Ali Rusdi. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Distributor Uang Di Desa Jampue, Kab. Pinrang.” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022). https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i2.3482.
- Anggi. “Saluran Distribusi: Pengertian, Fungsi Tahapan Dan Cara Memilihnya.” Accessed February 15, 2025. <https://accurate.id/>.
- Arafah, Muh. *Etika Pelaku Bisnis Islam*. wawasan Ilmu, 2022.
- Arafah, Muhammad. *Etika Perilaku Bisnis Islam*. Bayumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Ashari, Mutiara Latifa, dan Dyah Hariani. “Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.” *Journal of Public Policy and Management Review* 8, no. 2 (2019): 1–21.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/23711/21583>.

- Astuti, An Ras Try. "Ekonomi Berkeadilan: Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perpektif Muhammad Baqir Al-Sadr." *IAIN Pare-Pare* 4, no. 01 (2020): 20.
- Ayesha, Ivonne, Mayang Bundo, M Zaky Mubarak Lubis, Yuni Mariani Manik, Yudhistira Ardana, Nurul Ikhsanti, and Zahida I'tisoma Billah. *Ekonomi Mikro Islam*. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Azhari, Windy Novita. "Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi (Kabupaten Gunungkidul)," 2018.
- Bagus Pratama, Danu. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi." *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 197–214. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.794>.
- Day, Biro Infrastruktur dan sumber. "Program Kartu Tani: BRI Co- Branding," 2019. <https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/>.
- Dewantara, and Aditama. "ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 20–36.
- DKurniawan. *Seri Analisis Kebijakan Fiskal Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Ketahanan Pangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., 2017.
- Edi, Sarwo, Julfan Saputra, and Asmaul Husna. "Mekanisme Pasar Dala Konteks Islam." *Jurnal Emt Kita* 6, no. 1 (2022): 1–6.
- Fikri, et al. "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare." Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Fuadi, Eko S, N Basaria, et al. "Ekonomi Syariah, Yayasan Kita Menulis, Medan," 2021.
- Gunawan, Endro, and Sahat Pasaribu. "Persepsi Petani Dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2020): 131–44. <https://doi.org/10.14203/jep.28.2.2020.131-144>.
- Hakim, Lukman. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam." Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hamka, Muslimin Kara, et al. "Konsep Ekonomi Islam: Pemikiran Abu Yusuf Economic Concept: Thoughts of Abu Yusuf." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 25–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5968>.

- Ibrahim, Azhasyah. "Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-BI," 2021.
- Imani, Safarinda, Muhammad Zulfikar, et al. Kinanti. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Indonesia, Pemerintah. "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Di Akses Pada 15 February," 2025.
- Kholis, Ikmal, dan Khasan Setiaji. "Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi." *Economic Education Analysis Journal* 9, no. 2 (2020): 503–15. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39543>.
- Kurniawan, Ronal, et al. "Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Kartu Tani Pada Pupuk Bersubsidi Di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirotulu Kabupaten Pinrang." *PALLANGGA: Journal of Agriculture Science and Research* 2, no. 2 (2024): 105–10. <https://doi.org/10.56326/pallangga.v2i2.3366>.
- Kusumastuti, Adhi, et al. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Deepublish, 2020.
- Maghfiroh, Irganov, et al. "The Affecting of Farmer Ages, Level of Education and Farm Experience of the Farming Knowledge about Kartu Tani Beneficial and Method of Use in Parakan Distric, Temanggung Regency." *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 19, no. 2 (2022): 209–21. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.926>.
- Mufidah, Nur, dan Indah Prabawati. "Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Mahasiswa* 6, no. 9 (2018): hal 1-8.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- NURJANAH, Rohana Solihhatun. "Efektivitas Penggunaan Kartu Tani Untuk Pembelian Pupuk Bersubsidi Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas (Doctoral Dissertation; Universitas Jenderal Soedirman)," 2019.
- Nuryanti, Teti, Milla, et al. "Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Tingkat Petani Di Kecamatan Sukabumi Kbpupaten Sukabumi." *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)* 6, no. 1 (2023): 162. <https://doi.org/10.52434/mja.v6i1.2421>.
- Paminto, Saptaning Ruju. "Fungsionalisasi Kartu Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Di Kabupaten Cianjur Perspektif

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 114–24. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.288>.
- Pasaribu, S. “Persepsi Petani Dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2020): h.131-144.
- Pratama, Danu Bagus. “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi.” *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 197–214.
- Qhotrunnada, Kholida. “Saluran Sistribusi: Fungsi, Jenis, Hingga Tahapannya.” Accessed February 15, 2025. <https://finance.detik.com/>.
- Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2011.
- Ramlayana, Isa Ansyari, dan Sudarmi. “Efektifitas Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Para Petani Padi Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.” *Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar* 1, no. 4 (2020): 949–62.
- Safitri, Meliana Ayu. “Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa Di Sumberpucung Kabupaten Malang).” Brawijaya University, 2011.
- Sandu Sianto dan M. Ali Sodik. “Dasar Metodologi Penelitian,” 123. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Saptaning Ruju Paminto, Ibrahim Khalil Ahmad, et al. “Fungsionalisasi Kartu Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 114–24. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.288>.
- Semaun, Syahriyah, dan Darwis. “Pengaruh Strategi Penetapan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen (Analisis Etika Bisnis Islam).” *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020).
- Spencer, Milton H, and Orley M Amos Jr. “Contemporary Economics, Edisi Ke-8.” Worth Publishers, New York, 1993.
- Sugiono. “Metode Penelitian Pendidikan,” 336. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, S. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Dan Tafsir*. Amzah, 2022.
- Suryani, Suryani, Santun R. P. Sitorus, dan Untung Sudadi. “Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 8, no. 2 (2020): 147–60. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.2.147-160>.
- Tjiptono, Fandy. “Strategi Pemasaran, Edisi 4, Yogyakarta.” *Penerbit Andi Offset*, 2017.
- Triwati. “Implementasi Kebijakan Kartu Tani Di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang,” 2019.
- Wahyudin. “Petani.” *Wawancara Di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Tanggal 27 Mei 2025*, n.d.
- Wardana, R. “Pengertian Subsidi Dan Contoh Kebijakan Subsidi Di Indonesia.” *Diambil Kembali Dari Lifepal: <https://Lifepal.Co.Id/Media/Subsidi>*, 2020.
- Wawan Kurniawan dan Aat Agustini. *Metodologi Penelitian Kesehatan Dan Keperawatan; Buku Lovrinz Publishing*. LovRinz Publishing, 2021.
- Wiliam, J S, J Michael, and J W Bruce. “Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran, Cetakan 1.” Bandung: Penerbit Mandar Maju. PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUK, 1994.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zulkarnaen, W, Dewi Fitriani, Iis, Yuningsih, and N. “Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di Kpu Jawa Barat.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. June (2020): 222–43. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/372>.

LAMPIRAN





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR: B.1072/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024;
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 360 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024;
- b. Menunjuk Saudara:

Sulkarnain, M.Si

Masing-masing sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Citra Bunga Mentari

NIM : 2120203860202028

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : ANALISIS PEMBAGIAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KARTU

TANI DI DESA TEPPU KABUPATEN PINRANG

- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare

Pada Tanggal : 26 Maret 2024



Muzdalifan Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : CITRA BUNGA MENTARI
N I M : 2120203860202028
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PEMBAGIAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KARTU TANI DI DESA
TEPPO KABUPATEN PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS SISTEM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KARTU TANI DI
KELURAHAN TEPPU KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH)

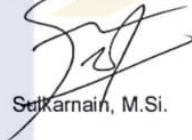
dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2025

Pembimbing Utama


Sul Karnain, M.Si.

Mengetahui:
Dekan,



Prof. Dr. Muzaeljah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197104082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1298/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

21 April 2025

5

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : CITRA BUNGA MENTARI
Tempat/Tgl. Lahir : TEPPU, 20 September 2003
NIM : 2120203860202028
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bishis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : TEPPU, KELURAHAN TEPPU, KECAMATAN PATAMPANUA,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KARTU TANI DI DESA TEPPU KABUPATEN PINRANG (PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0194/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 29-04-2025 atas nama CITRA BUNGA MENTARI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0295/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2025, Tanggal : 30-04-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0192/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2025, Tanggal : 30-04-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : CITRA BUNGA MENTARI
4. Judul Penelitian : ANALISIS SISTEM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KARTU TANI DI DESA TEPPU KAB.PINRANG (PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PETANI, BADAN PENYULUHAN, APARATUR DESA, DISTTIBUTOR
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampunua
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 30-10-2025.
- KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 Mei 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
KELURAHAN TEPPU**

Jalan Lasinrang Teppo, Kecamatan Patampanu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0421) ..., Email: patampanuateppo2021@gmail.com , Pos-el 91252

TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 044 / 243 / PEM

Berdasarkan Surat Penelitian Nomor 503/0194/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2025,
Tanggal 29 April 2025 Perihal Izin/Rekomendasi Penelitian, Maka kami menerangkan
bahwa :

Nama : CITRA BUNGA MENTARI
Nim : 21202038602028
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Teppo

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kelurahan Teppo
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan
Judul "Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Kartu Tani di
Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang" yang pelaksanaannya dari tanggal 29 April
2025.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dikemudian hari timbul akibat
hukum, maka merupakan tanggung jawab pengguna Surat Keterangan ini.

Teppo, 02 Juni 2025



ABDULLAH, ST

Pangkat : Penata Tk I

Id : 19700123 200701 1 018

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pinrang di Pinrang
2. Camat Patampanua di Teppo
3. Ybs Untuk diketahui
4. Pertinggal,-



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Citra Bunga Mentari
NIM : 2120203860202028
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Kartu Tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang (Prespektif Ekonomi Syariah)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Petani

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai menggunakan kartu tani untuk memperoleh pupuk subsidi di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana tahapan atau proses yang Bapak/Ibu lalui untuk mendapatkan kartu tani di Kelurahan Teppo?
3. Apakah jenis pupuk subsidi yang Bapak/Ibu terima selama ini sesuai dengan jenis tanaman yang Bapak/Ibu tanam di Kelurahan Teppo?
4. Apakah jumlah pupuk subsidi yang diterima sudah sesuai dengan luas lahan Bapak/Ibu di Kelurahan Teppo?
5. Apakah pupuk subsidi yang Bapak/Ibu terima datang tepat waktu sesuai dengan jadwal musim tanam di Kelurahan Teppo?
6. Di mana biasanya Bapak/Ibu menebus pupuk subsidi? Apakah kios tersebut mudah dijangkau dari lokasi pertanian Bapak/Ibu di Kelurahan Teppo?

7. Apakah harga pupuk subsidi yang Bapak/Ibu bayarkan sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) di Kelurahan Teppo?
8. Apakah kualitas pupuk subsidi yang Bapak/Ibu terima dalam kondisi baik?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kelangkaan atau kekosongan stok pupuk di kios yang ada di Kelurahan Teppo?
10. Apa saja kendala yang sering Bapak/Ibu hadapi ketika membeli pupuk subsidi menggunakan kartu tani di Kelurahan Teppo?
11. Apakah menurut Bapak/Ibu, petugas penyuluh, pengecer, dan distributor menjalankan tugasnya dengan jujur dan amanah di Kelurahan Teppo?
12. Apakah Bapak/Ibu merasa mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses distribusi pupuk subsidi di Kelurahan Teppo?
13. Apakah informasi mengenai kuota, harga, dan jadwal penyaluran pupuk subsidi disampaikan secara terbuka kepada petani di Kelurahan Teppo?
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah distribusi pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab?
15. Apakah sistem ini membawa manfaat bagi peningkatan hasil pertanian dan ekonomi keluarga Bapak/Ibu di Kelurahan Teppo?

Wawancara Badan penyuluhan pertanian (BPP)

1. Apa saja persyaratan dalam pembuatan kartu tani ?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Teppo melalui kartu tani?
3. Apa saja tugas penyuluh dalam mengawal distribusi pupuk subsidi ini?
4. Berapa maksimal luas lahan yang di miliki petani yang dapat membeli pupuk subsidi?
5. Berapa harga HET yang di tetapkan pemerintah ?
6. Apa saja jenis pupuk yang termasuk subsidi ?
7. Bagaimana penyuluh memastikan data RDKK sesuai dengan kebutuhan

petani?

8. Apakah ada kendala yang dihadapi penyuluh dalam proses penyaluran pupuk subsidi?
9. Apakah dalam praktik distribusi ini sudah mencerminkan keadilan dan transparansi menurut Ibu?

Wawancara Kepada Pengecer Ud. Sahabat Tani

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk subsidi dari distributor ke kios Ibu di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja persyaratan yang harus dibawa petani ketika menebus pupuk subsidi menggunakan kartu tani ?
3. Apakah ada kendala dalam proses penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani ?
4. Apakah Ibu selalu menerima pasokan pupuk tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup?
5. Apakah Ibu selalu menjual pupuk sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)?
6. Apakah terdapat pengawasan dari pihak tertentu dalam pelaksanaan penjualan pupuk subsidi di kios Ibu?
7. Menurut Ibu, apakah sistem penyaluran pupuk subsidi ini sudah mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan menurut pandangan Islam?

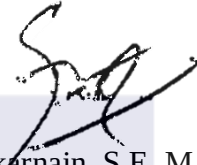
Wawancara Distributor CV. Mekar Tani

1. Sejak kapan Bapak/Ibu bertugas sebagai distributor pupuk subsidi di wilayah Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk subsidi hingga sampai kepada kelompok tani atau petani ?
3. Apakah penyaluran pupuk ke pengecer di Kelurahan Teppo dilakukan secara rutin sesuai jadwal musim tanam?
4. Berapa jumlah pupuk yang di alokasikan di Desa Teppo Kabupaten

Pinrang ?

5. Apa saja kendala yang paling sering Bapak/Ibu hadapi dalam menyalurkan pupuk subsidi ke Kelurahan Teppo?
6. Apakah terdapat monitoring atau pelaporan digital untuk distribusi pupuk di wilayah ini?

Mengetahui,-
Dosen Pembimbing



Sulkarnain, S.E. M.Si.
NIDN: 198805102019031005



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar
Umur : 20 Tahun
Alamat : Jl. Seligala
Pekerjaan : Admin JU. Mekar Tani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Desa Teppo Kabupaten Pinrang". Demikian surat keterangan di buat untuk di pgunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 26 Mei 2025
Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAPPE HUDONG
Umur : 51
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Penggar UD. Sahabat Tani Patanporwa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Desa Teppo Kabupaten Pinrang". Demikian surat keterangan di buat untuk di pgunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 15 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andini
Umur : 39
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang". Demikian surat keterangan di buat untuk di pgunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 25 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumarni
Umur : 45
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang". Demikian surat keterangan di buat untuk di pgunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 25 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APRUDIN
Umur : 42
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan " Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang " Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 28 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAFIUDDIN
Umur : 56
Alamat : TEPPU
Pekerjaan : TANI

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan " Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang " Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 28 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyudin
Umur : 50
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan " Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang " Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 28 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinar
Umur : 50
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani dan Buruh

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan " Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang " Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 28 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunnairi
Umur : 45
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang". Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 21 Mei 2025
Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : B. N. S. H.
Umur : 46
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Desa Teppo Kabupaten Pinrang". Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 21 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. Halim
Umur : 50
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang". Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 23 Mei 2025
Yang Bersangkutan


ABD. HALIM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Hy. Siara
Umur : 47
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Desa Teppo Kabupaten Pinrang". Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 23 Mei 2025
Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hentah (Oangsa)
Umur : 51
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Desa Teppo Kabupaten Pinrang". Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 27 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Utri
Umur : 35
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang." Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 27 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuar
Umur : 33
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang." Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 27 - 5 - 2025
Yang Bersangkutan



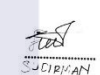
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suherman
Umur : 52
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Desa Teppo Kabupaten Pinrang". Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 28 Mei 2025
Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anbesunji
Umur : 67
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan " Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang " Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 28 Mei 2025
Yang Bersangkutan

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURAFNO EKO PUTRA RIFA'I
Umur : 35 Tahun
Alamat : Teppo
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan " Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang " Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 28 Mei 2025
Yang Bersangkutan

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baharuddin
Umur : 57
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan " Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang " Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 28 Mei 2025
Yang Bersangkutan

PUR. BAHARUDDIN

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamidah
Umur : 55
Alamat : Teppo
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Citra Bunga Mentari yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan " Analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang " Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 28 Mei 2025
Yang Bersangkutan

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS



Citra Bunga Mentari, yang akrab disapa dengan berbagai panggilan seperti Cite, Bunga, Citra, atau Mentari, lahir di Teppo, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 September 2003. Ia merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Hamsah dan Ibu Hj. Suma. Sejak kecil, penulis tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sederhana namun penuh kasih sayang, yang menanamkan nilai-nilai religius serta semangat untuk terus menuntut ilmu.

Pendidikan formalnya dimulai di TK Darma Wanita Teppo (2008), kemudian SDN 183 Teppo (2009–2015), dilanjutkan ke SMPN 2 Pinrang (2015–2018), dan melanjutkan ke SMK Negeri 1 Pinrang jurusan Akuntansi (2018–2021), di mana ia mulai mendalami minatnya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Setelah lulus, ia melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama kuliah, ia fokus pada studi akademik dan pengembangan diri.

